

PROYEK

P
L
T
A

KOTO ~ PANTANG

*laporan dari
lapangan*

PROYEK PLTA KOTO PANJANG
LAPORAN DARI LAPANGAN

Akhir April sampai pertengahan Mei, kami
yayasan Taratak) berhasil masuk ke Desa Batu Bersurat
Pongkai dan Koto Tuo. Target pengorganisasian kami adalah desa-
desa sepanjang Batang Kampar terutama desa-desa yang disebutkan
diatas. Saat ini kami juga sedang berusaha mencari kontak dengan
desa Pulau Gadang.

Seperti bisa dilihat di peta, PLTA ini membendung sungai Kampar
Kanan yang berasal dari dua buah sungai besar yakni Batang Kampar
dan Batang Mahat. Desa Tanjung Pauh dan Tanjung Balik yang terle-
tak di Sumatera Barat berada di tepi batang Mahat, sementara desa
Gunung Bungsu, Muara Takus, Koto Tuo, Pongkai, Tanjung Alai yang
termasuk Propinsi Riau terletak di sepanjang Batang Kampar. Ke dua
Sungai bertemu di desa Muara Mahat (juga di Riau) membentuk sungai
Kampar Kanan. Desa Pulau Gadang terletak di tepi sungai ini.
Bangunan waduk sendiri akan membendung sungai Kampar Kanan.
Lokasinya tidak jauh dari desa Pulau Gadang. Jalan propinsi yang
menghubungkan Sumbar dan Riau sejajar dengan Batang Mahat, sehingga
desa-desa Tanjung Pauh dan Tanjung Balik dilewati oleh jalan ini.
Desa-desa yang berada sepanjang Batang Kampar hanya dilalui oleh
jalan Tanah dan batu yang diperkeras (jeep track). Kedua jalan ini
bertemu di desa Muara Mahat tempat pertemuan Batang Mahat dan Batang
Kampar (lihat peta).

Berikut ini lapran awal kami, berita selanjutnya segera menyusu-
sul.

KONDISI UMUM DAERAH

Penduduk di lokasi PLTA ini berasal dari masyarakat adat yang sangat kust. Dalam tiap-tiap desa ada beberapa orang ninik mamak. Pucuk Adat yang memimpin suku-suku (lihat syarat 2. hak ulayat)

Selain itu mereka merupakan masyarakat santri yang sangat taat. Mesjid-mesjid yang cukup megah berdiri di desa-desa dalam jarak beberapa ratus meter saja, di bangun secara swadaya dari hasil wakaf serta infak penduduk. Di Batu Bersurat ada sebuah Pesantren Besar dengan lebih kurang 800 murid. Pesantren Tarbiyah Islamiah ini cukup tua dan terkenal sampai ke Aceh dan Malaysia.

Perekonomian masyarakat sebagian besar di dapat dari hasil kebun karet. Masing-masing KK rata-rata memiliki 2 - 4 Ha kebun karet. Hasilnya cukup besar. Dari 1 Ha kebun karet sekali sadap bisa menghasilkan sekitar Rp 30.000,- dan dalam seminggu bisa 2 -3 kali sadap. Intesitas penyadapan banyak tergantung pada jumlah tenaga kerja yang ada.

Selain . . . karet, kelapa dan kopi juga banyak terdapat dan mendatangkan ^{pend}ndapatan yang lumayan. Sebagian besar penduduk menanam padi ladang, dan ada juga beberapa orang yang mengelola sawah basah. Untuk kebutuhan beras, penduduk bisa mencukupi diri sendiri. Buah-buahan seperti nangka dan pisang juga melimpah (lih, soal ganti rugi).

Sungai Batang Kampar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan penduduk. Kehidupan mereka sehari-hari sangat terikat dengan sungai. Bisa dikatakan mereka adalah "Manusia Sungai".

Kebanyakan penduduk tidak terlalu ambisius (dengan kata lain tidak serakah). Mereka menyadap karet dan mengelola tanah secukupnya saja untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membiayai anak-anak mereka sekolah.

Mereka masih terbebas dari budaya konsumtif yang sering membuat orang mengeksploitasi alam dan sesama manusia.

Karena sawah dan ladang mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka dengan hanya ditanam sekali setahun, mereka tidak ngotot melipatgandakan kemampuan lahan mereka dengan memaksakan kesuburan artifisial lewat pupuk kimia dan pestisida. Demikian pula dengan kebun-kebun mereka. Penduduk jarang menggunakan pupuk atau menggunakannya dalam jumlah minimal. Juga dalam mengelola kebun karet, walaupun sebetulnya kebun ini bisa menghasilkan getah dalam jumlah bakup menggiurkan, mereka tidak ngotot menyadapnya terus-menerus (mis dengan mempekerjakan buruh).

Terkontrolnya nafsu untuk mengejar kekayaan juga tanpak dari cara mereka mengatur soal buruh ini.

Pembagian keuntungan antara pemilik dan buruh sangat fair (bodoh, bila dilihat dari kacamata kapitalis), misalnya sewaktu mengupah orang untuk menyadap karet. Pembagian hasil sadapan $\frac{2}{3}$ bagian untuk penyadap dan cuma $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun (bandingkan dengan cara kerja para pengusaha dimana pemilik modal mendapat segala keuntungan sementara buruhnya hampir tidak mendapat apa-apa)

Memang jadinya kehidupan mereka bersahaja, tetapi tidak miskin. Dan itu semua membuat cara hidup mereka secara ekologis dan sosial sangat harmonis.

PERKEMBANGAN SITUASI TERAKHIR

Desa Batu Bersurat merupakan desa terbesar karena berfungsi sebagai ibu kota kecamatan. Kondisi untuk keperluan pengorganisasian cukup rawan karena sebagai ibu kota kecamatan di desa ini terdapat Kantor Camat, Kantor Polisi, Koramil dan kantor pemerintah lainnya. Namun karena kontak pertama yang kami punya tinggal di desa ini, terpaksa kami mulai dari sini. Walaupun kondisinya cukup berbahaya, kami berhasil menemui beberapa orang yang cukup potensial. Demikian pula beberapa orang kontak potensial kami temui di desa Pongkai, tetangga desa Batu Bersurat. Kontak utama yang paling penting kami temui di Desa Koto Tuo.

Sampai awal Mei ini jenis-jenis kegiatan yang telah dilakukan pihak PLTA/PEMDA di lokasi investigasi adalah :

- 1) inventaris kekayaan penduduk
- 2) negosiasi (disertai manipulasi dan intimidasi) sehubungan dengan surat pernyataan rela pindah. (sudah diperoleh)
- 3) negosiasi surat persetujuan ganti rugi (sudah diperoleh)
- 4) penyiapan lokasi resettlement
- 5) inventarisasi satwa liar (gajah)

1. Inventarisasi Kekayaan Penduduk

Inventarisasi ini telah selesai akhir April yang lalu. Secara keseluruhan tidak ada masalah. Inventarisasi mencakup tanah (kebun, pekarangan, sawah, kolam dll), Rumah, Tanaman. Semuanya di bagi lagi dalam berbagai kriteria (lih. disoal ganti rugi). Selesai inventarisasi penduduk diminta menandatangani surat yang berisi daftar inventarisasi kekayaan mereka berdasar hasil pendataan tersebut.

2. Surat Pernyataan Rela Pindah

Memang kalau boleh memilih masyarakat tentu memilih tidak pindah sama sekali. Berat sekali bagi mereka untuk meninggalkan tanah leluhur (lih. syarat no. 2, tanah ulayat).

Jadi sebenarnya syarat pertama yang diajukan OECF Jepang mengenai harus adanya persetujuan bersedia pindah dari penduduk, apakah maksudnya ada pilihan: "tidak bersedia pindah" (yang aman dari segala tuduhan "menghambat pembangunan", "subversif", "PKI", dll) ? Kalau memang itu maksudnya, maka bolehlah pihak Jepang bersantai-santai mengamankan uangnya, karena tidak ada masyarakat yang rela pindah bila ada pilihan untuk boleh tinggal aman sentosa di kampungnya.

Seperti dalam surat terdahulu, surat pernyataan rela pindah yang harus ditandatangani oleh tiap-tiap KK ini dibuat dibawah paksaan. Penduduk didatangi dari rumah ke rumah dan diancam, kalau mereka tidak menandatangani surat tersebut saat itu, mereka akan kehilangan hak untuk mendapat uang ganti rugi beserta tanah dan rumah di tempat pemukiman Baru.

Mengenai surat pernyataan rela pindah ini ternyata belum semua membuat. beberapa penduduk yang kami temui di desa Batu bersurat menyatakan bahwa mereka belum pernah menandatangani surat apapun. Satu-satunya surat yang pernah mereka tandatangi adalah surat daftar inventaris kekayaan mereka. Mengenai surat pernyataan rela pindah ini mereka menyatakan tahu menahupun tidak. Jadi untuk sementara dapat disimpulkan bahwa belum semua KK menandatangani surat tersebut. Ada kemungkinan tanda tangan mereka dipalsukan atau bagi penduduk yang buta huruf, mereka ditipu.

Dalam rapat di Kabupaten sesudah pemaksaan ini, para pemuka masyarakat menuntut pihak PLTA/PEMDA untuk membuat juga surat pernyataan jaminan bahwa janji-janji mereka (bahwa masalah ganti rugi dan resettlement akan dibicarakan secara musyawarah mufakat. dengan penduduk) akan betul-betul dilaksanakan. Masyarakat berpendapat bahwa tidak masuk akal sebenarnya, mereka menandatangani surat pernyataan rela pindah, tanpa mengetahui kondisi kondisi macam apa yang mereka terima sebagai kompensasi persetujuan. Mereka telah berkorban dengan menandatangani sebuah persetujuan buta. karena itu mereka menuntut PLTA/PEMDA juga melaksanakan hak yang sama yaitu memberikan jaminan realisasi dari janji-janjinya. Sampai saat ini permintaan tersebut tidak pernah di gubris.

3. Persetujuan harga ganti rugi

Untuk membicarakan harga ganti rugi dan resettlement, PEMDA / PLTA beberapa kali memanggil wakil-wakil dari tiap-tiap desa untuk rapat di Kabupaten (Bangkinang). Yang diundang rapat biasanya wali desa (lurah), ninik mamak dan pemuka masyarakat lainnya.

Rapat - rapat untuk mencapai persetujuan ganti rugi dan resettlement berjalan alot. Menurut seorang pemuka masyarakat di Koto Tuo, undangan rapat biasanya datang mendadak serta tidak menyebutkan apa agenda rapatnya, jadi mereka tidak sempat berembuk dulu dengan masyarakat desanya untuk menentukan "standing position". Hal ini jadi menyebabkan mudahnya para peserta rapat "disetir" oleh pembawa acara.

Hasil - hasil rapat sering kali tidak memuaskan penduduk. Bahkan tersiar kabar bahwa para wakil yang pergi rapat itu menerima "uang rapat" sampai Rp 150.000,- per orang. Akibatnya kebanyakan ninik mamak tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Menurut seorang dari Koto Tuo, ninik mamak dan pemuka masyarakat yang diundang rapat ke kabupaten kebanyakan berstatus pegawai negeri, sehingga dalam rapat mereka tidak berani terlalu banyak omong

Ketidak puasan masyarakat dan issue sogok itu telah menyebabkan lurah Batu Bersurat di usir penduduk ± dua bulan yang lalu. Sekarang lurah tersebut telah diganti dengan yang baru, hanya belum diresmikan. Masyarakat masih menaruh curiga dengan lurah yang baru dan enggan berhubungan dengannya.

Puncak keresahan masyarakat ketika para ninik mamak menandatangani surat persetujuan harga ganti rugi. Menurut seorang ninik mamak yang ditemui, hal itu mereka lakukan karena terpaksa. Rapat persetujuan harga dilakukan dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, ketika masyarakat (yang sangat kuat tradisi ber agamanya itu) sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan Hari Raya, terutama menyambut para perantau yang pulang kampung. Kali inipun undangan rapat datang mendadak dan tidak ada pemberitahuan bahwa rapat akan menentukan masalah harga ganti rugi malam itu juga, sehingga ninik mamak datang kerapat tanpa persiapan apa - apa.

Rapat berjalan sangat alot, sampai jam empat dini hari. Pihak PEMDA/PLTA bersikap sangat keras. Akibatnya karena lelah dan takut, apalagi dijanjikan bahwa ganti rugi yang ditandatangani saat itu hanyalah ganti rugi "sementara" berhubung surat persetujuan itu harus segera dikirim ke Jepang, para ninik mamak dari delapan desa itu menyerah. Hanya 3 orang yang bersikeras tidak mau menandatangani, ketiganya berasal dari desa Koto Tuo, bahkan salah satu diantaranya wali desanya sendiri. Memang desa Koto Tuo terkenal paling keras dan ngotot dalam soal PLTA ini. Dan wali Desanya Datuk Manan terkenal sebagai satu-satunya wali yang mati-matian mempertahankan kepentingan rakyatnya. Sayangnya ketiga orang ini belakangan terpaksa pula menandatangani surat persetujuan tersebut, setelah berkali-kali didatangi oleh pihak aparat dan Pemda.

Penandatanganan ini membuat rakyat geger, sehingga ada beberapa ninik mamak yang tidak berani memperlihatkan daftar harga ganti rugi tersebut kepada masyarakat desanya. Tuduhan "makan sogok", "penjual anak kemenakan" makin menjadi - jadi. Di isukan mereka masing - masing menerima uang Rp 200.000,- untuk tanda tangan itu.

Di Desa Pulau Gadang terjadi demonstrasi oleh para pemuda. Poster-poster di tempel berisikan umpatan dan ancaman kepada ninik mamak yang menandatangani surat persetujuan harga ganti rugi.

Dan beramai-ramai mereka mendatangi kantor Bupati untuk memprotes. Hanya saja, menurut berita, para demonstran ini berhasil ditenangkan oleh orang Kabupaten.

Desa Pulau Gadang merupakan desa pertama yang akan dipindahkan karena desa ini dekat dengan lokasi pembangunan konstruksi dam. Kabarannya desa ini sudah harus pindah tahun ini juga.

Kami sedang berusaha masuk kedesa ini, situasinya cukup sulit karena lokasi desa ini ditepi jalan raya dan dekat dengan kantor - kantor pemerintah termasuk kantor polisi. Apalagi setelah demonstrasi itu banyak aparat dan intel berkeliaran. Mudah - mudahan melalui kontak kami di Desa Koto Tuo, kami bisa menghubungi beberapa "key person" di Desa Pulau Gadang.

Secara keseluruhan, rasa ketidak-puasan masyarakat kepada proyek PLTA ini telah berbiak cepat menjadi pertanyaan - pertanyaan sinis dan ketidak-puasan kepada pemerintah, Beberapa orang berani mengungkapkannya terang-terangan sebagian besar mengendapkannya diam - diam bagai gunung yang siap meledak.

Didalam lampiran daftar harga ganti rugi, juga terlampir satu foto kopi surat persetujuan harga dasar ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan untuk keperluan proyek PLTA Koto Panjang antara "wakil" masyarakat desa Koto Tuo dengan pihak PLTA. Seluruh delapan desa di Kec. XII Koto Kampar membuat persetujuan macam ini.

(Dalam surat persetujuan dari desa Koto Tuo ini ada tiga tempat tandatangan yang kosong dari tiga orang wakil yang tidak mau menandatangani ; belakangan mereka dipaksa juga untuk tandatangan)

Surat inilah yang dikirim sebagai bukti ke Jepang untuk memenuhi syarat kedua dari OECF : bahwa besar ganti rugi telah dibicarakan dan disetujui oleh masyarakat.

Harap diperhatikan: Surat ini dibuat tanpa persetujuan masyarakat.

Surat ini tidak sah karena :

1. Para penandatangan tidak bisa dianggap mewakili penduduk.
2. Para penandatangan tidak bermusyawarah mufakat dulu dengan masyarakat sebelum menandatangani.
3. Para penandatangan menandatangani surat persetujuan ini dibawah manipulasi dan paksaan.
4. Harga dasar ini sama sekali tidak disetujui masyarakat.

Penduduk tidak mau mengambil mengambil uang ganti rugi ini bila tidak dirubah. tapi point : "pelaksanaan pembayaran ganti rugi via bank", bisa jadi masalah, karena ini membuka peluang manipulasi seolah soal pembayaran ganti rugi sudah selesai. Dengan cara ini pihak PLTA tinggal membuka rekening / tabanas atas nama penduduk yang bersangkutan untuk membayar uang ganti rugi, sehingga kesannya semua pembayaran ganti rugi sudah beres. Protes dengan cara berkeras tidak mengambil uang ganti rugi menjadi tidak efektif.

Dalam waktu dekat kami bermaksud mengusahakan sebuah surat bantahan dari masyarakat, yang menyatakan bahwa surat persetujuan harga ganti rugi tsb tidak sah.

4. Resttlement.

Pemerintah telah mengajukan beberapa lokasi untuk resttlement penduduk diKoto Ranah, selatan Muara Takus dan selatan Siberuang (semuanya di Kab. Kampar). Lokasi ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Kebanyakan tidak menyetujui lokasi yang disediakan oleh Pemda /PLTA.

Sampai saat ini satu - satunya resettlement yang sudah selesai disiapkan PEMDA / PLTA adalah resettlement bagi penduduk pindahan dari desa Pulau Gadang. Berita mengenai buruknya kondisi tempat yang baru telah menyebar di kalangan masyarakat. Dikabarkan desa yang baru itu tak ubahnya seperti perkampungan transmigrasi. Rumahnya kecil-kecil, menyedihkan, dengan lantai tanah. Demikian pula mesjidnya. Hal ini menyebabkan masyarakat mengajukan syarat-syarat seperti No.3, 4, dan 5.

Banyak hal lain yang menyangkut resettlement ini yang dikeluhkan penduduk. Seorang guru di desa pongkai yang juga seorang petani sukses menyesali tanahnya yang subur, yang harus ditinggalkan. Memang tanah di desa - desa tersebut sangat subur. Banyak sawah yang tidak dipupuk tapi masih tetap menghasilkan. Selain itu desa - desa disitu terletak di atas daerah yang topografinya landai, sehingga mudah diolah. Guru tersebut menyatakan tanah yg subur dan landai di desanya tidak sebanding dengan tanah pegunungan yang terjal dipemukiman baru Apalagi masyarakat tidak terbiasa bertani di tempat kemiringan tinggi yang membutuhkan teknik - teknik khusus yang tidak diketahui penduduk.

Hal lain yang dikeluhkan penduduk adalah soal sungai. Mereka sudah terbiasa hidup di tepi sungai dan mendapatkan sumber air melimpah dari sungai batang kampar. Di lokasi baru di daerah bukit - bukit itu, mereka mereka mempertanyakan sumber air yang tersedia.

Ada satu hal yang menarik. Ketika melakukan negosiasi-negosiasi soal pemindahan ini, pihak Pemda / PLTA berusaha keras untuk membuat masyarakat setuju untuk dipindahkan ke Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Berbagai janji-janji uluk di keluarkan (banyak yang ajaib misalnya "keuntungan PIR per bulan untuk 1 Ha kebun kelapa sawit sampai Rp 300.000,-. Bayangkan kalau bapak-bapak masing masing punya dua hektar" !)

Kelihatan sekali ada "pesan sponsor" di belakangnya. Tampaknya, bersikerasnya Pemda / PLTA soal PIR ini karena ada "kongkalingkong" dengan para pengusaha perkebunan. Pengusaha butuh tenaga kerja murah, PLTA butuh resettlement murah. Jadi klop.

Untung masyarakat sebagian besar tidak bodoh, mereka tahu bagaimana buruknya kondisi di perkebunan-perkebunan kelapa sawit itu. (lih, PLTA untuk siapa & Keuntungan ganda kelapa sawit)

3. Inventarisasi satwa liar (gajah).

Pihak PLTA selalu memfokuskan masalah satwa liar yang terkena dampak lingkungan pada gajah. Team satwa PLTA menyebutkan jumlah gajah di lokasi yang harus dipindahkan 27 ekor. Kami sempat bertemu dengan seorang penduduk yang menjadi penunjuk jalan dan pencari jejak tim satwa PLTA ketika mereka melakukan pendataan gajah di Kecamatan VIII Koto Kampar sekitar 7 bulan yang lalu.

Menurut informasi masyarakat ada beberapa kelompok gajah di sekitar desa mereka. Gajah yang 27 ekor itu hanya dari satu kelompok saja. Banyak kelompok - kelompok lain yang tinggal berpencar-pencar. Mengingat team tersebut berada di lokasi hanya dalam waktu singkat (10 hari) sementara wilayahnya sangat luas tidak heran taksiran populasi yang mereka simpulkan cuma segitu.

Pada hal menurut sipencari jejak, penyadap karet, dan peladang yang kami temui semua meyakini jumlah gajah jauh lebih besar daripada itu. Taksiran terendah sekitar 60 ekor sampai ratusan ekor.

Pada hal saat ini gajah - gajah tersebut sudah sempit ruang gerakannya "Rimbo Gadang" yang menurut penduduk dahulu merupakan tempat tinggalnya sekarang sudah habis dibabat untuk perkebunan kelapa sawit dan HPH. Karena ^{habitatnya} menyempit itulah beberapa tahun belakangan ini, semenjak perkebunan kelapa sawit mulai banyak berdiri, sang gajah acap menyerbu ladang penduduk. Itulah yang menyebabkan masyarakat sangat kesal dengan perkebunan - perkebunan kelapa sawit (lihat: perkebunan kelapa sawit). Dengan direndamnya wilayah sekarang oleh PLTA, dikhawatirkan si gajah makin sempit ruang gerakannya dan makin ganas menyerang ladang dan perkampungan penduduk. (ingat peristiwa air Sugihan).

Sementara itu selain gajah banyak satwa lain yang tidak pernah (atau tidak berani?) dilaporkan oleh PLTA keberadaannya. Sebut saja harimau. Tak usah jauh - jauh, disepanjang jalan yang membelah desa mereka saja ada beberapa lokasi yang terkenal sebagai "daerah harimau".

Selain itu beruang madu jga merupakan salah satu binatang yang "disembunyikan" oleh PLTA. Jumlah mereka menurut penduduk cukup banyak. Bahkan acap pula masuk ke kampung numpang makan buah-buahan seperti kelapa, rambutan, sempeyak. Kebanyakan memang beruang ini tinggal di dalam hutan.

Binatang lainnya adalah tapir yang di daerah ini dikenal dengan nama cipan. Binatang ini menurut penduduk tinggal di hutan-hutan dan jarang masuk kampung. Dan jangan lupa, tapir ini tergolong a very endangered spe cies dan endemic di Sumatra.

Kalau itu belum cukup, di rimba-rimba di sekitar lokasi hidup pelbagai jenis primata seperti siamang, gibbon, leaf monkey (lutung-lutungan). Belum lagi kambing hutan Sumatra yang juga merupakan spesies endemik.

Semua binatang yang disebutkan diatas merupakan jenis-jenis binatang yang masuk dalam daftar binatang yang harus dilindungi, yang (sengaja?) tidak pernah dilaporkan oleh tim lingkungan PLTA! (takut memansing kemarahan dunia?)

Diatas semuanya kalau kita membicarakan apa yang hilang, kita berbicara soal hilangnya ekosistem rimba tropika dengan segala biodiversitinya hasil evolusi ribuan tahun. Kehilangan ini tidak akan tergantikan oleh apapun juga.

Alam Riau memang sudah habis dirajah rayah, Jutaan hektare hutannya sudah berubah menjadi areal-areal perkebunan, HPH (beserta pabrik kayu lapis dan pabrik kertasnya). Sedikit areal yang tersisa akan ditenggelamkan pula !

Perkembangan terakhir = ± 100 orang masuk mamak
di bawah oleh PLTA / PEMDS untuk melihat - lihat
"keberhasilan" waktu sarung * Minik mamak di
di sekitar yg pegawai negeri * dan tidak banyak orang

* awal - akhir may ini

SYARAT-SYARAT YANG DIMINTA PENDUDUK

Memang kalau boleh memilih, masyarakat tentu memilih tidak pindah sama sekali. Berat sekali bagi mereka untuk meninggalkan tanah leluhur.

Namun bila (jengankan mengajukan usul) punya pikiran untuk tetap tinggal di desa sekarang saja sudah menjadi tindak pidana subversif, penduduk terpaksa hanya bisa mencoba menaikkan "bargaining position" mereka agar nasib mereka kelak tidak terlalu menyedihkan (walaupun meninggalkan tanah leluhur saja sudah malapetaka bagi mereka)

Secara garis besar syarat-syarat yang mereka ajukan sbb. :

1. Ganti Rugi

Syarat mutlak : ganti rugi harus dibicarakan dan disetujui masyarakat.

Ganti rugi yang dipaksakan pemerintah sekarang dianggap gila. Coba bandingkan harga ganti rugi yang diajukan penduduk dengan ganti rugi pemerintah.

Lihat saja contoh-contoh berikut:

(Ada tiga komoditi utama yang menjadi sumber kehidupan utama penduduk y.i. karet, kelapa, kopi. Jadi dalam membicarakan masalah ganti rugi, tiga jenis tanaman ini hendaknya diutamakan)

- Karet

Harga satu batang pohon karet (sumber penghidupan utama penduduk) yang ditetapkan pemerintah Rp. 2000,-.

Padahal satu hektar kebun karet rakyat berpotensi menghasilkan sekitar 10 kg karet setiap harinya. Dengan harga jual Rp 600,- - Rp 700,-/ kg, dalam setahun 1 hektar kebun (terdiri ± 500 batang) bisa menghasilkan lebih dari Rp 2.000.000,-

Dan pemerintah bermaksud menukar kebun itu dengan harga cuma Rp 1.000.000,- !

- Kelapa

Harga kelapa yang dipatok pemerintah termasuk yang paling gila: Rp 4.000,- untuk yang telah menghasilkan (TM) dan Rp 1.500,- untuk yang belum menghasilkan (TBM).

Dalam sebatang kelapa bisa bergayut lebih dari 30 butir kelapa yang masak bergantian. Secara umum tiap-tiap bulan bisa diturunkan 1 - 2 tandan kelapa, masing-masing berisi 6-10 butir. Sesudah dipetik tumbuh lagi tandan baru. Jadi pohon kelapa tsb memproduksi terus sepanjang tahun, padahal harga 1 butir kelapa di pasar Batu Bersurat Rp. 400,- sebutir. Dan pohon kelapa ini tidak membutuhkan mod-1 apa-apa, tidak dirawat, tapi terus berbuah.

Jadi bisa dibayangkan rendahnya harga yang dipatok pemerintah yg cuma seharga satu tandan kelapa. Jauh lebih mahal harga buahnya dari harga pohonnya!

- Kopi

Cuma Rp 1600,- TM, Rp 500 TBM! (sudah tak sanggup kasih komentar)

- Durian

Cuma dihargai Rp. 8.250 (TM) dan Rp. 2.000,- (TBM) !!

Padahal tiap kali musim durian (setahun sekali), satu pohon bisa berbuah sampai lebih dari 300 buah!

Mau tanam lagi di kampung yang baru? Silahkan tunggu 20 tahun sebelum mencicip buah pertama !

- Tanah Pekarangan

Di desa-desa Tanjung Alai, Batu Bersurat, Pongkai, Koto Tuo, Muara Takus, Gunung Bungsu, semua masuk kategori 4&5, jadi harga tanah pekarangan penduduk cuma Rp 450,- sampai Rp 550,- per meter.

- Tanah Sawah

did daerah ini tidak begitu banyak sawah dan kebanyakan tanpa irigasi, jadi harganya Rp 400 ,- m2 !

- Tanah Kebun

Tanah inilah jantung kehidupan penduduk. Disini mereka menanam karet, kopi, cengkeh, padi ladang, cabai, singkong dan palawija lainnya, juga buah-buahan. Tanah yang subur yang hampir-hampir tidak memerlukan pupuk, dan tanah ini cuma dihargai Rp 30,- - Rp 50,- semeternya !!

- Tanah Kolan

Harganya jauh lebih mahal dari tanah-tanah yang lain. Maklumlah didaerah ini kolam hampir-hampir tidak ada. Sungai Kampar itu melimpah ikannya, buat apa bikin kolam ? Pasti lain cerita pemerintah kalau proyeknya ada di daerah pertambangan.

- Bangunan

Apakah kriteria bangunan permanen ? Apakah bangunan dari semen ? Kebanyakan rumah penduduk, rumah kayu yang dibangun diatas tiang. Banyak diantaranya rumah-rumah kuno, indah berukir yang terbuat dari kayu belian. Harga kayu belian (ulin) sudah tak ternilai sekarang, dan bangunan seperti ini cuma dihargai Rp 25.000 per meter.

Bangunan batupun jadi masalah. Di desa-desa di pinggir sungai ini memang cukup murah orang membangun rumah batu karena pasir dan kerikil tinggal mengambil dari sungai. Tapi di lokasi pemukiman baru dimana pasir dan kerikil susah didapat rumah batu tampaknya cuma bisa diimpikan. Apalagi melihat harga ganti rugi bangunan batu semi permanen hanya Rp 42.000,- -Rp 46.000,- per meter persegi. (Hampir tidak ada bangunan semi permanen lengkap disini karena kriteria lengkap berarti punya WC di dalam rumah, sementara WC penduduk biasanya berjauhan dari rumah induk)

2. Tanah Ulayat.

Tanah ulayat suku yang terendam harus diganti dengan tanah lain dengan luas sama.

Ada hal yang menarik disini. Pihak PLTA mengatakan, seperti yang dituturkan oleh DR. H. Tabrani Rab, Ketua Lembaga Studi Sosial Budaya Riau*) bahwa pembangunan PLTA Koto Panjang ini berbeda dengan pembangunan waduk Kedung Ombo, khususnya yang menyangkut masalah sosial. Menurut Beliau proyek PLTA Koto Panjang ini tidak akan menimbulkan sosial friksiseperti di Kedung Ombo, karena di Koto Panjang ini keterikatan masyarakat dengan tanah tidak begitu kuat. *) dalam MUTIARA, minggu II 1990, Januari. Hal ini menjadi pernyataan yang sungguh menggelikan begitu kita bertemu dengan kenyataan di lapangan.

Masyarakat Kec. XIII Koto Kampar merupakan masyarakat dengan tradisi adat yang kuat. Adat istiadat mereka mengacu pada adat Minang Kabau termasuk bahasa dan struktur sosial masyarakatnya.

Didalam tiap-tiap desa di daerah ini terdapat unsur ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai sebagai "tiga tungku sejarahangan" Pola ini merupakan ciri khas struktur sosial masyarakat Minang. Para ninik mamak sebagai tetua adat, sangat berpengaruh dan dihormati. Mereka masing-masing memimpin sekelompok keluarga dari satu clan (suku), diketuai oleh seorang Penghulu. Didalam satu kampung biasanya terdapat lebih dari tiga suku. Beberapa diantara suku-suku yang terdapat disini sama dengan suku-suku di Sumatra Barat seperti suku Chaniago dan Piliang.

Suku-suku ini merupakan kelompok masyarakat yang sudah sangat tua, yang mendiami wilayahnya semenjak ratusan tahun yang lalu, sehingga seperti juga di Minang Kabau suku-suku ini memiliki wilayah tanah ulayat.

Yang jadi masalah, PLTA (sengaja) tidak mengakui eksistensi adat mereka, seperti tercermin dalam ucapan DR. Tabrani Rab diatas. Terutama hak mereka atas tanah ulayat ini tidak diakui, sebab menurut pihak PLTA dan Pemda (dibantu "pakar-pakar" ilmu sosialnya), tanah ulayat (yang biasa disebut tanah pusako) hanya ada pada suku Minang Kabau di Sumatra Barat.

Hal inilah yang membuat ninik mamak berang. "Kami jangan disamakan dengan orang Riau Kepulauan. Disana orang memang tidak punya tanah-tanah ulayat, tapindisini masyarakat dan budaya kami berinduk ke Minang Kabau walaupun secara geografis kami berada di wilayah propinsi Riau"

Karena itu salah satu tuntutan mereka, tanah ulayat mereka yang terendam harus diganti tanah pula dengan luas sama. "Kami tidak menuntut uang ganti rugi bagi tanah ukayat kami, karena tanah ulayat tidak bisa diperjual-belikan begitu saja. Lagipula bagaimana meng"uang"kan tanah rimba. Kami minta tanah diganti tanah." Salah seorang ninik mamak menambahkan, "Memang sekeliling desa kami hutan rimba, tapi jangan menganggap hutan itu daerah tak bertuan seperti di Jawa. Itu adalah wilayah tanah ulayat suku-suku yang ada disini" tandasnya. Oleh sebab itu tanah-tanah ulayat mereka yang ada disekitar waduk dan tidak masuk daerah genangan, mereka menuntut supaya tetap jadi hak milik mereka.

Berdasarkan penuturan penduduk, tampak jelas bahwa bagi mereka desa-desa yang akan dibenamkan itu bukan hanya sekedar tempat tinggal tapi juga "tanah tumpah darah", tempat sejarah mereka berakar, tempat nenek moyang mereka dikuburkan. Kebun-kebun karet yang mereka olah berada diatas tanah yang mereka warisi turun temurun, makam-makam kuno yang dikeramatkan juga merupakan saksi sejarah.

Memang, sejarah mereka di tanah itu bukan hanya sejarah dangkal puluhan tahun.

3. Kebun Karet 2 Ha.

Syarat berikut yang mereka menuntut adalah, masing-masing KK mendapat kebun karet siap sdap seluas 2 Ha. Dan kebun karet itu bukan pola PIR.

Penduduk menanyakan, kenapa kalau proyek ini memang telah disiapkan sejak lama (feasibility study dan andalnya sudah siap tahun 1984). mereka tidak dipersiapkan jauh-jauh harisebelumnya. Karena kalau diganti rugi secara mendadak seperti sekarang, bagaimanapun besarnya mereka tetap akan merugi.

Kebun-kebun karet mereka menghasilkan cukup banyak untuk keper-

luan mereka (lih. ganti rugi karet), dan karet rakyat itu membutuhkan 6 tahun sebelum bisa berproduksi penuh. Bila mereka sekarang pindah ke daerah baru, uang ganti rugi (yang kecil tsb.) akan habis untuk mempersiapkan kebun, ladang, rumah dll., (apalagi kalau kondisi rumahnya seperti rumah trans, sementara rumah-rumah penduduk sekarang banyak yang cukup bagus. (lih. soal ganti rugi) Walaupun mereka menanam kembali tanaman karet, kelapa, kopi yang merupakan sumber penghasilan utama mereka, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sampai bisa diambil hasilnya. Sementara itu, dari mana mereka dapat uang untuk biaya hidup mereka sehari-hari? Dari mana uang untuk menyekolahkan anak mereka?

Jaminan hidup 1-2 tahun model transmigran (meliputi kebutuhan dasar seperti beras, minyak, ikan asin) tidak berkenan dihati mereka. Memang berdasarkan pengalaman, sistem jaminan hidup model trans itu sangat mudah dipermainkan (dan dikorupsi), dan mutu makanan yang disuplai dari kualitas paling rendah (makanan babi, komentar penduduk).

Jadi, permintaan 2 ha kebun karet siap sadap itu merupakan permintaan yang sangat wajar menurut mereka.

4. Jangan perlakukan kami sebagai transmigran.

Penduduk menganggap mereka sejak leluhur adalah pemilik (Lords of the land) tanah-tanah di lokasi PLTA dan sekitarnya. Jadi mereka tidak mau cara perlakuan terhadap mereka, cara mereka dipindahkan, cara resettlement dan pola resettlement mereka mengikuti pola transmigrasi. Mereka tidak sudi menjadi transmigran di tanah leluhur mereka sendiri. Mereka menganggap dalam hal ini status mereka berbeda dari transmigran dari Jawa.

Oleh sebab itu mereka menuntut agar perkampungan mereka yang baru nanti tidak seperti perkampungan transmigran (mis, rumah tidak seperti rumah trans), dan desa-desa baru mereka diatur sedemikian rupa sehingga adat istiadat yang lama, struktur adat dll tidak berubah. Mereka menganggap kepindahan mereka seharusnya hanya lah seperti menggeser sedikit desa mereka ke arah lebih keatas.

5. Kami harus ikut menentukan lokasi kampung baru.

Pertama-tama mereka mengharap agar mereka dipindahkan ke lokasi tanah-tanah ulayat mereka yang tidak terendam, sehingga akar se-

jarah mereka tidak hilang. Tanah-tanah ulayat ini nanti merupakan daerah-daerah di tepi danau, sehingga tentu saja prioritas penggunaan tanah-tanah ditepi danau harus diberikan kepada mereka (an ticipasi yang sungguh tepat mengingat tanah-tanah dipinggir danau sudah banyak dipesan oleh para investor). Selain itu mereka menuntut supaya lokasi penampungan mereka yang baru terletak di tepi jalan mobil.

6. Bangunan fasilitas umum (terutama mesjid) diganti dengan bangunan yang sama.

Masyarakat Kec. XIII Koto Kampar adalah komunitas yang sangat religius. Apalagi sebuah pesantren tua yang besar dan terkenal berada disitu. Pengaruhnya sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan sosial penduduk banyak berpusat di mesjid baik berupa pengajian, ceramah, sembahyang jamaah, pertemuan-pertemuan dll. Jadi mesjid mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Tak heran mereka shock melihat mesjid yang disediakan di tempat resettlement bagi penduduk Pulau Gadang ; mesjid kecil berukuran 7mx8m, padahal mesjid-mesjid mereka yang lama besar-besar dan indah (banyak yang sungguh indah dari kayu berukir, dan ukurannya paling kurang 15x15m, banyak yang jauh lebih besar). Dan perlu dicatat, mesjid-mesjid itu dibangun oleh mereka sendiri. Tanahnya dari tanah wakaf, dan biayanya dari uang wakaf dan infaq penduduk.

Alasan PLTA membangun mesjid seadanya macam itu karena menurut PLTA mesjid baru itu "gratis" pemberian proyek, sedangkan mesjid yang lama telah diganti rugi (uangnya masuk kas desa). Padahal menurut hukum Islam yang mereka percayai, tanah wakaf itu haram diperjual belikan, demikian pula bangunan yang didirikan dari uang wakaf.

Karena itu mereka tidak mau mesjid-mesjid mereka diganti dengan uang. Harus dengan bangunan dengan ukuran dan kualitas yang paling tidak sama dengan yang lama. Syukur-syukur lebih besar dan bagus. Hal yang sama juga mereka tuntut dari bangunan publik lainnya.

7. Biaya pindah tanggungan PLTA.

Karena proyek ini bukan atas prakarsa mereka, penduduk menuntut agar biaya pindah ke tempat yang baru ditanggung oleh PLTA. "Kalau tidak, bisa habis uang ganti rugi kami" tutur seorang penduduk. Bila biaya ditanggung penduduk bisa membawa sebanyak mungkin apa yang mereka punya ke tempat yang baru.

UNTUK SIAPA SEBENARNYA BENDUNGAN INI ?

Drs. Rivai Rahman ketua Bappeda Riau mengungkapkan bahwa pembangunan PLTA Koto Panjang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan di sektor perkebunan. "Riau yang handal dengan sektor pertambangan selama ini ternyata belum banyak mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disini. Untuk itu Pemda Riau beralih ke sektor perkebunan yang telah dimulai dengan pembukaan ratusan ribu hektare perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida" ungkapnya. "Meningkatkan energi listrik sangat vital bagi industri perkebunan, maka harapan satu-satunya adalah PLTA Koto Panjang untuk menanggulangi biaya produksi yang tinggi. Karena selama ini pengusaha masih memakai generator sendiri. Hal ini yang membuat investor jadi ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di sektor ini." tandas Rivai Rahman di hadapan wartawan dan pimpinan surat kabar di Padang. (dari Mutiara minggu II, Januari 1990)

Menurut Bupati Kampar Salah Djasit SH, menjadikan era industrialisasi di daerahnya makin terdengar derapnya. Kegiatan-kegiatan industri membutuhkan tenaga listrik yang besar. Dalam kaitan ini pengembangan wilayah perkebunan baik komoditas kelapa sawit, kelapa hibrida, karet atau coklat, dalam perkembangan selanjutnya membutuhkan pabrik-pabrik pengolahan yang harus digerakkan oleh tenaga listrik yang sangat besar. "Bayangkan saja, untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit kira-kira 100.000 hektar saja, setidaknya diperlukan 10-15 pabrik besar dengan kapasitas masing-masing 60.000 ton per tandan basah per jam. Dari mana sumber tenaga listriknya diperoleh? Tentu sumbangsih PLTA Koto Panjang akan sangat besar sekali" tandasnya. (Apalagi kita tahu perkebunan kelapa sawit di Riau ini beratus-ratus ribu hektar luasnya!). Panji Masyarakat 21-31 Januari 1991.

Bahkan menurut Gubernur Riau (Sang Gubernur bukan putra daerah, beliau orang Jawa) sendiri mengakui, manfaat yang akan diperoleh dari proyek PLTA Koto Panjang a.l, tenaga listriknya yang sebesar 114 MW yang dampaknya akan mampu mendorong pembangunan industri seperti pabrik kelapa sawit, kayu lapis dan industri hilir lainnya. (Berita Buana, 9 April 1991)

Menurut seorang dari dinas perkebunan di Pekanbaru, saat ini ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit yang ditanam dekade lalu mulai menghasilkan. Kebutuhan pabrik pemrosesanpun jadi mendesak. Sampai sekarang untuk diproses buah-buah kelapa sawit itu dikirim ke Medan.

Dari ungkapan-ungkapan diatas, jelas sudah siapakah yang mendapatkan manfaat (atau bahkan pemrakarsa?) dari proyek PLTA itu.

Tampaknya sejak kebun-kebun kelapa sawit dan perkebunan-perkebunan lainnya juga industri hilir seperti kertas dan kayu lapis mulai didirikan, sudah ada rencana (atau kerja sama) pemerintah untuk membangun sumber tenaga listrik (murah). Sebab, bagaimana mungkin rangkaian kejadian ini menjadi ko insiden yang pas sekali.

Argumentasi pemerintah tentu industri-industri itu justru bertujuan mensejahterakan rakyat Riau. Benarkah demikian?

Bumi Riau memang kaya raya. Mulai dari minyak yang merupakan salah satu penghasil terbesar di Indonesia, Hutan rimba tropika yang mensuplai puluhan ribu ton kayu sehari untuk pabrik-pabrik kayu lapis dan pabrik kertas raksasa, jajaran mangrove terbaik di Sumatra (dan dunia). Perkebunan-perkebunan yang luasnya jutaan hektar. Semua menjadikan Riau sebagai salah satu pencetak uang terbesar di Indonesia.

Namun kalau kita menyusuri negeri Riau, masuk ke kota kotanya, kampung-kampungnya, tak tercegah lagi hati akan bertanya-tanya. Kemana larinnya hasil alam yang luar biasa banyaknya itu? Kemana larinnya uang milyaran dolar itu? kenapa tak nampak bekas-bekasnya? Wajah Riau miskin dan kotor. Tak terbayang pada wajah-wajah penduduk yang lalu lalang, pada kampung-kampungnya, pada kota-kotanya, merekalah pemilik negeri yang kaya raya, hutan rimba penghasil kayu terbaik, tanah dengan kandungan minyak jutaan barrel, lahan dimana ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit didirikan.

Ketua BAPPEDA Riau Drs. Rivai Rahman sendiri mengakui "Riau yang handal disektor pertambangan selama ini ternyata belum banyak mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disini, untuk itu PEMDA Riau beralih ke sektor perkebunan."

Nah, sudah jelas industri tambang (minyak, terutama) boleh di coret dari daftar "industri untuk menaikkan kesejahteraan rakyat" Sebetulnya sungguh mengenaskan sektor pertambangan ini tidak mampu menaikkan taraf hidup rakyat. Dari hasil tambang itu saja kalau itu diperuntukan bagi rakyat Riau sendiri, Negeri Riau sudah sekaya Brunei.

Bagaimana dengan perkebunan ? Perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu alasan utama pembangunan PLTA Koto Panjang bisa menjadi contoh yang unik.

Oleh penduduk, kebun kelapa sawit ini disebut-sebut sebagai tempat kuli-kuli orang Jawa. Dan kehidupan kuli Jawa ini sangat mengenaskan. Beberapa penduduk menceritakan mengganasnya perampokan-perampokan di Riau berasal dari transmigran Jawa yang tidak mampu lagi mempertahankan hidupnya di perkebunan. Daripada mati kelaparan mereka terpaksa merampok. "Tak ada lagi yang dimakan, mau apa lagi ?" Demikian cerita penduduk.

Sebuah perkebunan kelapa sawit dekat desa mereka bisa menjadi contoh kasus dan kisah yang menarik dari perkebunan ini.

Perkebunan itu luasnya 250.000 Ha (sekitar 25 kali luas danau Singkarak) memakan banyak tanah-tanah penduduk. Daerah itu sebelumnya berupa "Rimba gadang", rimba raya perawan penuh gajah, harimau, tsipir, beruang, dan binatang-binatang lain.

Pada waktu pembukaan lahan, kayu-kayu yang diturunkan luar biasa banyak dan hebatnya. "Kalau kita berdiri di samping balok kayu itu" demikian cerita seorang penduduk, "dan merentangkan lengan ke atas, masih lebih tinggi penampang batang kayu itu, dari ujung tangan kita!". "Entah berapa ribu tahun usia batang-batang kayu itu" sesal seorang penduduk lainnya. "Mungkin disaksikannya bagaimana gunung merapi tumbuh". Dan alangkah bagusnya kayu-kayu itu ; meranti, keruing, belian.

Menurut penduduk pembukaan lahan itu dikontrakkan langsung pada pihak pembeli kayu. Jatuhnya sama saja seperti mendapat lisensi HPH. Bahkan lebih menguntungkan karena mereka bisa te -

bang habis. Penduduk yakin, biaya pendirian kebun kelapa sawit itu tertutup oleh uang hasil penjualan kayu pada waktu pembukaan lahan, bahkan jauh berlebih. "Hutan itu betul-betul rimba perawan" ujar mereka.

Sesudah rimba itu di tebas, penduduk mendapati bahwa gajah-gajah yang dahulu tinggal di sana sekarang menyerbu ladang-ladang mereka. "Habis bagaimana lagi, kebun-kebun itu dipagari kawat berlistrik. Gajah tak bisa masuk, terpaksa lah rakyat yang jadi sasaran".

Dan semus mengatakan "kalau tidak karena serangan gajah ini sudah lebih kaya penduduk di sini. Kita bisa menanam karet bibit unggul yang hasilnya banyak". Menanam karet baru dengan kondisi seperti ini berarti harus menunggunya selama 4 - 5 tahun, supaya tidak habis diserbu gajah. Dan tidak hanya karet muda, ladang padi pun seringkali diserbu.

Dan bila dulu sebelum ada perkebunan, gajah-gajah yang kebetulan turun sampai ke dekat ladang penduduk gampang diusir dengan bunyi-bunyian, kini mereka menjadi ganas dan tidak takut pada manusia. Bahkan mereka berani menyerang manusia yang mencoba mengusirnya. Maklum saja, bagi si gajah pun tak ada pilihan lain. Habitatnya yang dulu sudah lenyap, kalau tidak berani masuk ladang penduduk berarti mati kelaparan.

Lucunya dengan perkebunan ini, statusnya yang dulu PTP VI, begitu mulai berproduksi "entah mengapa" berubah menjadi PT yang kabarnya dimiliki oleh seorang Petinggi Negara.

Inilah salah satu profil perkebunan yang diharapkan akan "men-sejahterakan masyarakat Riau", yang demi untuknya 20 ribu jiwa diharuskan mengungsi dari kampung halamannya.

Di bawah ini dipaparkan kilasan tentang beberapa "lokomotif pembangunan" di provinsi RIAU.

MEMBEDAH WAJAH-WAJAH DEWA PEMBANGUNAN

Keuntungan ganda kelapa sawit

Dengan melihat kasus-kasus diatas begitu transparan sepak terjang pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit, cara-cara mereka memeralat hubungannya dengan pemegang kekuasaan untuk memperoleh bebagai keuntungan yang menggiurkan.

Dalam kasus Riau dan PLTA skenarionya tampaknya sbb:

Pertama, mereka mengusahakan konsesi perkebunan, melalui hubungannya dengan pusat kekuasaan (kemungkinan besar orang-orangnya memang mereka-mereka juga). Lahan konsesi ini tentu mencaplok banyak tanah rakyat dan menghancurkan habitat ribuan satwa liar (termasuk yang dilindungi).

Kayu yang diperoleh pada waktu proses pembukaan lahan nilainya sangat tinggi, bahkan jauh lebih menguntungkan dari konsesi HPH, karena di HPH mereka terpaksa menerapkan selective logging (TPI), sedangkan pada pembukaan lahan untuk perkebunan mereka tentu saja punya legitimasi untuk tebang habis (clear cut).

Uang yang diperoleh dari hasil penjualan kayu sangat boleh jadi menutup seluruh modal awal yang dibutuhkan untuk membuat perkebunan, bahkan mungkin lebih.

Sebagai buruh didatangkan tenaga kerja murah, transmigran dari Jawa. Ongkos pemindahan dan kemungkinan tidak dikembalikan oleh perkebunan, melainkan dibebankan pada negara (mungkin pula dari hutan yang harus dibayar rakyat) melalui program transmigrasi.

Biasanya pada tahap pertama baru sebagian areal konsesi yang ditanami. Penanaman dilanjutkan pada tahap selanjutnya dan ini tentu saja membutuhkan penambahan pekerja dalam jumlah sangat besar. Mencari pekerja ini merupakan masalah besar, karena sangat sedikit orang yang mau di pekebunan kelapa sawit, kecuali bila tidak

Dan untuk itu ada problem besar lain : listrik

Untuk membuat pabrik-pabrik raksasa itu tentu generator diesel cukup mahal. Seperti yang sudah menjadi afatnya, pengusaha tentu berusaha mencari ongkos produksi yang semurah mungkin.

Dan jawaban kedua masalah itu ada pada proyek PLTA:
Listrik murah dan buruh murah.

Tidak heran bahwa kita jadi menduga-duga adanya persengkokolan antara pengusaha perkebunan dan pemerintah untuk membuat rencana proyek PLTA ini. Apalagi kita tau sama tau siapa saja yang memiliki saham dalam perkebunan-perkebunan itu.

Pabrik Kertas Indah Kiat

Perusahaan kertas raksasa ini memproduksi 12 ribu ton kertas setengah jadi setiap harinya, melahap ribuan ton kayu bulat dari kualitas terbaik seperti ; meranti, banio dan kayu ulin.

Kayu sebanyak itu disuply oleh beberapa HPH raksasa yang dioperasikan oleh pengusaha-pengusaha Cina.

Pabriknya yang dikelilingi pagar beton setinggi 5 m, tak bisa dimasuki orang luar tanpa izin-izin khusus. Dari jarak 10 km sudah tercium bau busuk yang memualkan dari areal pabrik yang berasal dari polusi hasil pemerosesan bubur kayu. Menurut beberapa pekerja orang yang tidak terbiasa akan muntah-muntah bila memasuki areal pabrik.

Pabrik kertas raksasa ini mempekerjakan buruh-buruh dari Jawa dan sebagian kecil dari Tapanuli, dengan kondisi kerja yang menyedihkan. Bekerja di pabrik raksasa yang penuh dengan zat-zat kimia itu, kesehatan mereka tidak diperhatikan.

Untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan pertengkaran yang acap kali timbul baik dengan buruh, pemasok bahan baku maupun penduduk sering diturunkan aparat militer seperti Kopasus dan Arhanud.

BANTAHAN TERHADAP "DAMPAK POSITIF" PLTA

Dalam publikasi-publikasinya mengenai PLTA (seperti contoh terlampir yang disiapkan PLTA untuk sebuah seminar LSM pertengahan bulan Mei lalu di Pekanbaru), pemerintah selalu menyatakan bahwa pembangunan PLTA Koto Panjang tidak mempunyai dampak negatif sama sekali. Dilain pihak pemerintah sibuk mempublikasikan serentetan dampak positif dari proyek ini.

Di bawah ini dipaparkan sejumlah argumentasi terhadap dampak positif proyek PLTA yang dikemukakan pemerintah.

1) Dampak positif (DP) :

- Tenaga listrik sejumlah 114 MW yang dihasilkan PLTA akan memberikan andil yang besar dalam memacu pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di provinsi Riau daratan, dibidang :
 - a. Pembangunan industri Hilir, seperti pabrik kelapa sawit, kayu lapis, karet dll.
 - b. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga
 - c. Pariwisata

Argumentasi :

- a. Sebetulnya inilah alasan sebenarnya di balik pembangunan proyek PLTA ini. Tapi seperti telah diuraikan di atas sumbangan industri-industri ini terhadap kesejahteraan rakyat Riau perlu diragukan.
- b. Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga tidaklah semudah itu. Yang dibutuhkan terutama modal, skill dan pasar ; bukan sekedar listrik. Lagipula kalau buat industri kecil, tidak perlu listrik sampai 114 MW !

2) Dampak Positif(DP) :

- PLTA Koto Panjang dibangun untuk menerangi rumah-rumah penduduk Riau.

Argumentasi :

Alasan ini agak jarang dikemukakan oleh pemerintah, mungkin karena terlalu besar kadar bohongnya. Dalam makalah yang di siapkan PLTA untuk seminar diatas pun tidak ada (tidak berani ?) disebut-sebut bahwa tujuan proyek ini untuk konsumsi listrik rumah tangga penduduk.

Sebab kalau memang untuk suplai listrik rumah tangga penduduk perusahaan-perusahaan tambang minyak raksasa seperti Caltex yang telah menghisap jutaan barrel emas nitam dari dalam bumi Riau sudah sepantasnya membayar dan "membalas jasa" pada rakyat Riau dengan menyediakan listrik bagi propinsi yang penduduknya cuma tiga juta jiwa itu.

Atau kalau belum cukup, pembangkit-pembangkit listrik skala kecil bisa menambah yang kurang.

3) DP :

- Pengembangan wilayah baru melalui pembangunan jalan nasional baru. Selain itu kondisi jalan baru yang lebih bagus akan mempertinggi faktor keamanan, kenyamanan dan mempercepat waktu tempuh.

Argumentasi :

- Kalau ini dijadikan alasan, tanpa proyek PLTA pun jalan bisa dibikin, asal ada uangnya. Lewat PLTA atau tidak membangun jalan tetap butuh uang dan uang untuk membangun jalan di proyek PLTA itu juga dari hutang, bukan hadiah dari langit ; sama saja dengan kalau membuat jalan sendiri.

Bahkan membangun jalan lewat PLTA sebetulnya rugi karena PLTA menenggelamkan jalan yang lama. Sementara kalau kita membuat jalan sendiri tanpa proyek PLTA, akan ada dua buah jalan. Itu berarti mengurangi beban masing-masing jalan, memperluas daerah yang terjangkau jalan, memperluas kesempatan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat (karena makin banyak jalan makin besar peluang aktivitas ekonomi).

4) DP :

- Terbukanya lapangan kerja, membuka lapangan usaha baru di daerah sekitar waduk.

Argumentasi :

- Pemerintah sepertinya berasumsi bahwa penduduk di sana penganggur semua. Padahal masyarakat sudah punya pekerjaan ; mereka punya kebun, ladang, sawah dll. Bahkan mereka kekurangan tenaga kerja untuk menyadap karet,

Proyek PLTA ini membunuh sumber mata pencaharian ribuan penduduk. Apa artinya kesempatan kerja di proyek yang cuma sementara itu ? (Apalagi kualifikasi yang dimiliki masyarakat setempat paling-paling hanya mampu membuat mereka mengisi peluang kerja sebagai buruh kasar). Proyek PLTA dan peluang kerjanya hanya merubah status penduduk dari "landlords" menjadi buruh !

5) DP :

- Pembangunan dan penghunian lokasi pemukiman baru, berarti mengumpulkan penduduk pada satu tempat yang sebelumnya terpencar-pencar, sehingga memudahkan penduduk untuk mendapat alokasi pembangunan fasilitas umum yang lebih banyak dari pemerintah, seperti listrik, air bersih, sekolah lanjutan, dll.

Argumentasi :

- Penduduk tidak terpencar-pencar ! Perkampungan mereka sistematis dan teratur di sepanjang sungai Kampar dan sungai Mahat. Dan pola perkampungan mereka yang seperti itu sudah berjalan ratusan tahun. Kalau mau memberikan fasilitas umum, berikan saja di kampung mereka yang sekarang. Bahkan itu jauh lebih murah karena jalan sudah ada jadi tidak perlu membangun jalan baru, paling-paling tinggal memperbaiki yang lama.
Air bersih ? Sungai Kampar dan Mahat serta sumur-sumur penduduk melimpah airnya. Di desa-desa ini sumber air sangat banyak, penduduk terbiasa dengan air yang melimpah. Listrik ? Sekolah lanjutan ? Kalau memang niatnya mau mendirikan sekolah dan memberi listrik, kenapa harus di lokasi yang baru ? Sebetulnya penduduk di sini cukup swadaya mesjid-mesjid yang besar dan megah dibangun dari wakaf dan infak masyarakat tanpa bantuan dari mana-mana.
Pesantren besar dengan 1000 orang murid setingkat SMP & SMA itu juga bukan sekolah negeri.

Sungguh tidak masuk akal membongkar perkampungan yang sudah begitu mapan dan teratur dengan akar sejarah begitu lama lalu membangun kampung baru hanya supaya mudah menyalurkan fasilitas yang notabene juga bisa dilakukan (dengan jauh lebih mudah dan murah) ditempat yang lama.

6) DP :

- Program yang dirancang di lokasi pemukiman baru (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dll) akan dapat meningkatkan pendapatan rata-rata tahunan penduduk, dibandingkan dengan pendapatan rata-rata tahunan di desa asal.

Argumentasi :

- Kalau memang tujuannya untuk meningkatkan masyarakat bikin saja program seperti itu di tempat yang sekarang. Program di lokasi yang baru maupun yang lama sama saja biayanya. Bahkan di tempat yang lama jauh lebih murah karena kebun-kebun sudah ada, tidak perlu membuka lahan baru. Sawah juga begitu tinggal memperbaiki mutunya saja dan mengelola daerah yang sudah dikenal baik oleh masyarakat tentu lebih mudah daripada daerah yang baru sama sekali.

7) DP :

- Mengendalikan banjir

Argumentasi :

- Kalau cuma mau mengendalikan banjir, buat saja dam pengendali banjir, bukan proyek PLTA raksasa seluas 124 km² yang menenggelamkan kampung halaman puluhan ribu jiwa. Dan jangan lupa banjir mulai mengganang semenjak hutan daerah hulu digunduli oleh HPH serta dibabat menjadi kebun-kebun kelapa sawit raksasa. Seharusnya pengusaha-pengusaha itu yang bertanggung jawab dan bukan rakyat setempat.

TENGGELAMNYA CANDI MUARA TAKUS

Candi Muara Takus, konon merupakan candi tertua di Sumatera. Dalam kompleks percandian seluas lebih kurang satu hektar itu, berdiri empat bangunan candi yang kini diberi nama, masing-masing : Candi Tua, Mahligai, Palangka, dan candi Bungsu.

Meskipun candi itu sudah diketemukan (tentu saja oleh Belanda) jauh sebelum Indonesia merdeka, tapi masih banyak yang belum bisa diungkapkan para ahli mengenai peninggalan sejarah yang satu ini. Melihat kompleks bangunannya yang begitu indah dan megah, ada yang menyatakan bahwa besar kemungkinan di sini pernah berpusat kerajaan Sriwijaya.

Sungguhpun begitu, apa yang sampai saat ini sudah berhasil diungkapkan mengenai candi Muara Takus, sungguh belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan benda-benda kuno yang ditemukan baik oleh peneliti (untuk kepentingan ilmu pengetahuan) maupun oleh penduduk (ditemukan secara kebetulan untuk kemudian dijual).

Melihat letak (lokasi) candi yang di pinggir sungai (batang) Kampar, dapatlah dipastikan bahwa mobilitas penduduk kerajaan (?) ini dulunya sangat tergantung pada sungai. Dengan ditemukannya peninggalan benda-benda kuno di Batu Bersurat (13 kilometer di hilir kompleks candi), memperkuat keyakinan akan hal itu.

Untuk mengamankan situs sejarah candi Muara Takus, Pembangunan waduk PLTA Koto Panjang yang semula permukaan genangannya direncanakan 100 meter di atas permukaan laut, diturunkan menjadi 85 meter. Dengan demikian, kompleks candi — dalam radius empat hektar — yang ketinggiannya 87,5 meter di atas permukaan laut, akan aman.

ANALISIS

Kalaupun apa yang diomongkan pemerintah RI masih bisa dipercaya, dan kompleks candi Muara Takus dalam radius 4 hektar tidak tenggelam, tetap saja proyek PLTA Koto Panjang terasa bagai bencana. Karena, pulau seluas empat hektar — yang di atasnya terdapat empat buah candi — yang terapung di tengah-tengah waduk seluas 124 kilometer persegi itu, tidak lagi bermakna.

Siapapun seharusnya tahu, bahwa untuk memahami/melakukan interpretasi terhadap suatu peninggalan purbakala, yang dibutuhkan justeru penelitian/penggalian-penggalian di daerah sekitar temuan itu.

Rekonstruksi suatu pusat kebudayaan dan bahkan mungkin pusat kerajaan (seperti hipotesis orang tentang situs Muara Takus), tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pengamatan di areal kecil tempat lokasi candi itu berdiri saja. Dengan kata lain bila ingin menyibak sejarah candi Muara Takus, tidak cukup hanya menyelamatkan candi itu saja. Areal luas disekitarnya terutama daerah sepanjang sungai harus diselamatkan pula, bahkan mungkin disitulah kunci penyibaknya terdapat. Suatu jantung budaya, suatu pusat kerajaan, jelas bukan areal kecil seluas satu-dua hektar saja.

Jika benar kompleks percandian itu dapat diartikan sebagai pertanda pusat kerajaan, yang mobilitasnya bergantung pada sungai, lantas bagaimana mungkin melakukan kajian mengenai kehidupan masyarakatnya, bila sungai itu tersuruk tanpa bekas di dasar genangan waduk ?

TAWARAN PENYELESAIAN MASALAH

पूर्व

問題

Pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa harga ganti rugi tidak mungkin ditambah lagi, karena dananya sudah dipatok sejak awal yaitu 35 milyar rupiah. Ini tidak bisa diganggu gugat. Duit sebegitu tentu saja tidak mencukupi untuk ongkos mengganti kehidupan 20 ribu jiwa dari komunitas yang begitu mapan, dengan cara manusiawi.

Jawaban kita tentu : kalau tidak punya duit tidak usah bangun proyek.

Yang terjadi sekarang modus operasinya sama seperti kalau kita belanja ke pasar dan ngotot membeli barang yang harganya 10.000 rupiah dengan duit 3.000 rupiah. Kalau yang punya toko tidak memberikan, dipaksa (pakai belati). Perampokan ! (analoginya cocok sekali). Bahkan lebih parah, karena dalam kasus Koto Panjang ini barangnya sebetulnya tidak mau dijual.

Kalau masih ngotot mau beli juga, uang yang tidak cukup itu tentu mesti ditambah. "Dari mana ?" tanya pemerintah eh si pembeli. "Duit saya cuma segini !" Siapa yang mesti nambah itu duit ? Tentu saja orang yang memerlukan dan akan memaksi barang tersebut!

Dalam hal ini tuntutan kita sudah jelas : Batalkan proyek !

Kalau itu tidak mungkin, penuhi semua persyaratan yang diminta penduduk. Kalau uangnya tidak cukup ada beberapa usulan :

- Minta tambahan uang dari OECF Jepang untuk menyelesaikan soal ganti rugi (Ini sebetulnya merupakan pilihan terakhir, karna berarti jumlah hutang luar negeri kita makin besar).
- Suruh pihak-pihak yang paling berkepentingan dan diuntungkan dengan pembangunan waduk ini (dalam hal ini para pengusaha perkebunan dan industri hilir lainnya) untuk sama-sama menambah dana ganti rugi yang kurang.

Tampaknya pilihan yang nomor dua lebih masuk akal. Logikanya : Kita harus adil ; apa kontribusi orang-orang yang menikmati hasil suatu pembangunan kepada orang-orang yang berkorban untuk pembangunan itu?

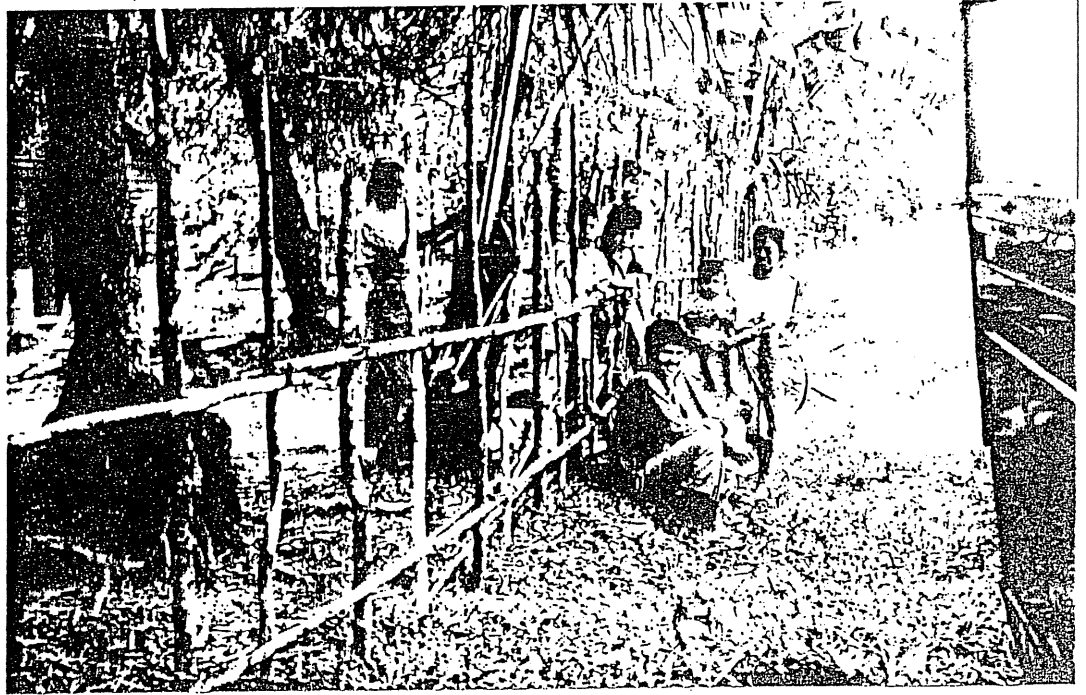
Dalam hal ini para pengusaha yang paling menikmati hasil listrik PLTA Koto Panjang ini, harus memberikan kontribusi bagi orang-orang yang tergusur.

Mengingat betapa raksasanya perusahaan-perusahaan itu, dan betapa diuntungkannya mereka oleh produksi listrik Koto Panjang, maka permintaan itu sangat wajar bahkan sudah seharusnya.

Apalagi kalau (lagi-lagi) mengingat entah berapa trilyun rupiah yang sudah mengalir ke kocek mereka dari hasil menguras alam Riau.

Sering kita membaca di koran-koran, perusahaan-perusahaan raksasa menyediakan dana milyaran rupiah untuk kegiatan-kegiatan prestisius seperti pertandingan tenis atau rally mobil. Bahkan menyediakan hadiah satu milyar rupiah bagi pemecah rekor pertandingan lari.

Sudah sepantasnyalah kini mereka membuka kocek untuk membiayai penduduk suatu negeri yang alamnya telah memberi kekayaan tak terhingga bagi mereka, penduduk yang kini bahkan harus rela disingkirkan demi kelanjutan bisnis raksasa mereka.



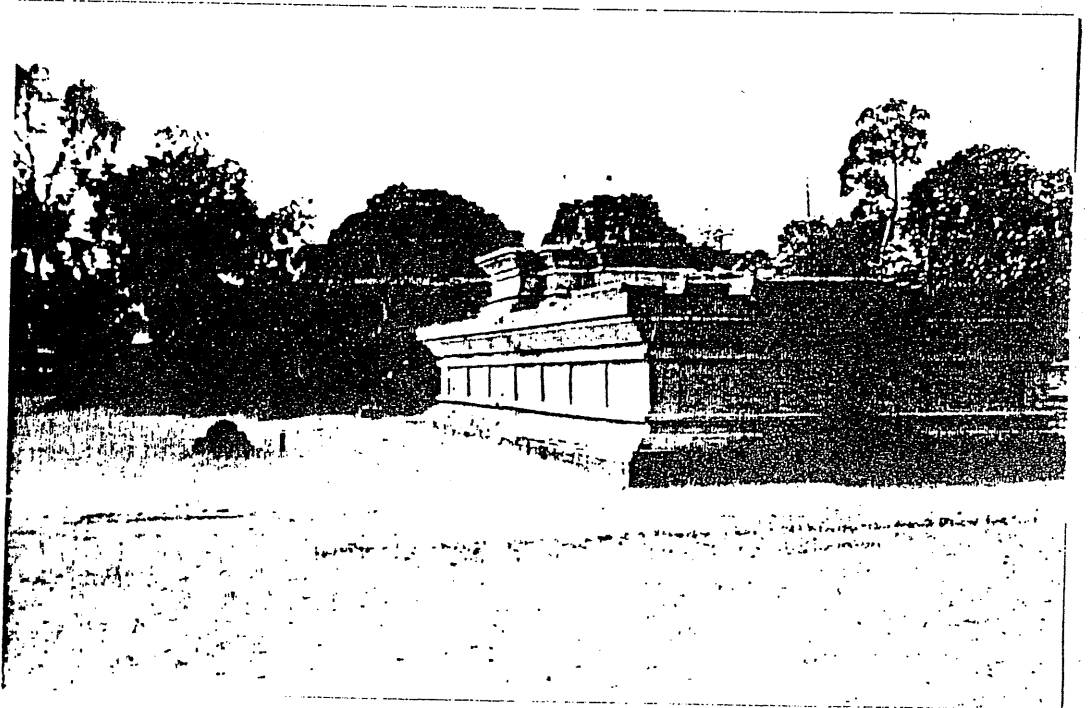
Dirunlah sebuah rumah di desa Batu Bersmea



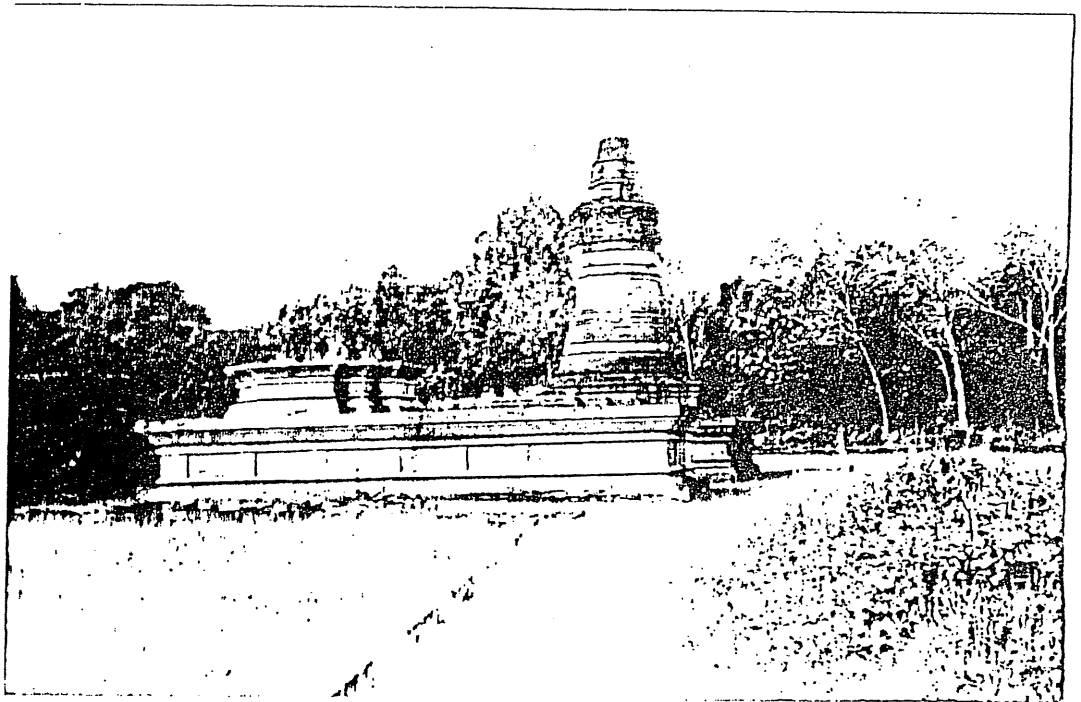
"Manusia sungai"

Sungai Kampar membelah desa² menjadi dua
sebuah rakit penyebrangan yg menghubungkan
desa kota tua yg terletak di kedua belah sisi
sungai

Candi Mwanra Talus



Candi yg di belahang belum selesai dipugar



Ada stupa besae yg mirip di pagoda.

コトパンジャン水力発電所プロジェクト 現地報告

地域の一般的状況	2
近況	3
1. 住民の財産測量	3
2. 移転宣誓書	4
3. 補償基準合意	4
4. 移転	7
5. 野生動物（象）の調査	8
住民が要求する条件	9
1. 補償金	9
2. ウラヤット地（慣習的共有地）	11
3. ゴム園 2 ha	12
4. 移住政策に基づく移住者のように扱って欲しくない	13
5. 新しい移転先の地域の決定に住民も参加できなければならない	13
6. 公共施設（特にモスク）は同じものを建てること	13
7. 発電所側による移転費用の負担	14
このダムはいったい誰のためのものなのか	14
開発の神々の顔を暴く	17
パームやしのダブルの利益	17
インダー・キアット製紙工場	18
水力発電所の「好ましい影響」に対する反論	18
ムアラタクス寺院の水没	21
考察	22
問題解決の要求	22

（※訳注：1991年）4月末から5月半ばにかけて、私たち「タラタック協会」は、バトゥ・ブルスラット村、ポンカイ村とコト・トゥオ村を訪れることができました。私たちが、住民をまとめ、団結させる取り組みの対象となったのは、カンパル川沿いの村々、特に上で述べたような村でした。現在、私たちはさらにプロウ・ガダン村ともコンタクト

を取ろうと試みているところです。

地図から見て分かるように、この水力発電所は、カンパル・カナン川をせき止めることになります。この川はさらに、バタン・カンパル川とバタン・マハット川の2つの支流に分かれます。西スマトラ州のタンジュン・パウ村とタンジュン・バリット村は、バタン・マハット川の川辺にあり、一方リアウ州のグヌン・ブンス村、ムアラ・タクス村、コト・トゥオ村、タンジュン・アライ村はバタン・カンパル川沿いに位置します。2つの支流はマハット河口で合流して、カンパル・カナン川となっています。プロウ・ガダン村はこの川の川辺にあります。ダムはこのカンパル・カナン川をせき止めます。また、ダムの位置はこのプロウ・ガダン村からあまり遠くありません。西スマトラとリアウを結ぶ州道は、バタン・マハット川と平行に流れていて、タンジュン・パウ村とタンジュン・バリット村はこの州道沿いにあります。バタン・カンパル川沿いの村々では、石と土を固めた道路でしか移動が出来ません。この2つの道路は、ムアラ・マハット村で合流します。

地域の一般的状況

この水力発電所建設地周辺の住民社会は、根強い慣習社会です。それぞれの村には、氏族を統括する慣習的組織の指導者といえる人たちがいます。

また、住民は非常に敬虔なイスラム教徒です。村々には数百メートル毎に、たいへん立派なモスクが建てられていて、これらは住民のお布施によって建設されたものです。また、バトゥ・ブルスラット村には、800人もの生徒をかかえる大きなプサントレン（イスラム寄宿学校）があります。このタルビヤ・イスラミーヤ寄宿学校は歴史もあり、アチェやマレーシアにまで知られています。

住民の経済の大部分はゴム園からの収穫でまかなわれています。1世帯辺り平均して2～4ヘクタールのゴム園を所有しています。そこからの利益はかなりあります。1ヘクタールのゴム園から、1回の採取で3万ルピアの売り上げになります。また、1週間に2、3回樹液は採取して集めます。この頻度は、彼らの労働力次第です。

ゴムのほかには、ヤシやコーヒーも相応の利益を上げています。住民の多くは陸稲を耕作していますが、中には水田を耕作している人もいます。米は自給自足です。また、ナンカ（ジャックフルーツ）やバナナのような果物も豊富です。

バタン・カンパル川は住民の生活と切り離すことは出来ません。住民の生活は川と大変結びつきが強いものです。彼らを「川の民」と呼んでもいいでしょう。

住民の多くはそれほど野心的ではありません。彼らは日々の生活をまかない、子供たちの学費を出せるほどのゴムを採取したり、農地を耕したりしています。

彼らは、しばしば自然や同じ人間同士を搾取するような消費的な文化からまだ無縁です。彼らの水田や畑は、1年に1度の農作で十分な食糧が生産できるため、化学肥料や農薬を

使ったりする人工的な方法でもって、生産力を無理に上げようとはしません。ゴム園についても同じです。住民は肥料をほとんど使わないか、また使ったとしても最小限です。ゴムの木の樹液は溢れるほど出るけれども、(例えば労働者を雇ったりして)、継続的に採取しようとはしません。

「富」を求めない彼らの姿勢は、次のような労働者との利益の分配の仕方にも見て取ることが出来ます。所有者と労働者の分配は、たいへん公正なものです(資本主義的な観点から見れば、ばかげているかもしれません)。例えば、ゴムを採取する労働者に賃金を支払うとき、収益の3分の2は労働者のものになり、所有者は3分の1しか受け取りません。よって彼らの生活は大変質素なものです。しかし貧しくはありません。こうして彼らの生活はエコロジカルで、社会的にも調和のとれたものになっているのです。

近 況

バトゥ・ブルスラット村は郡庁所在地であり、現地で最大の村です。したがって郡庁をはじめ、郡警察、軍の郡司令部など政府機関が多く、住民をまとめあげる啓蒙活動を行うのは大変困難です。しかしながら、私たちが最初に連絡が取れた人がこの村に住んでいたのも、ここから始めることにしました。状況は大変危険でしたが、かなり有望な人物数名に会うことが出来ました。バトゥ・ブルスラット村のとなり、ポンカイ村でも何人かの有望な人物に会うことが出来ました。私たちが出会った中で、コト・トゥオで会った人がもっとも重要な協力者になりました。

この(※訳注：1991年)5月初めまでに、水力発電所及び地方政府が行ったことは次のようなものです。

- 1) 住民の財産目録
- 2) 移転宣誓書(すでに集められた)に関する交渉(情報操作や脅迫行為を伴う)
- 3) 補償同意書(すでに集められた)の交渉
- 4) 移転先の準備
- 5) 野生動物(象)の目録

1. 住民の財産測量

この測量は、先の(※訳注：1991年)4月後半にすでに終了しました。全体的には問題はありませんでした。測量の範囲は、土地(農園、屋敷地、水田、池など)、家屋、作物をカバーします。全てがいくつかの基準に分けられるのです(補償金の話参照)。測量が終わると、住民は、その測量結果に基づいた財産目録にサインを求められるのです。

2. 移転宣誓書

もし選択が可能だとしたら、住民は当然移転しないことを選ぶでしょう。彼らにとって、先祖代々の地を去ることは大変つらいことなのです（第2章、ウラヤット地参照）。

日本の OECF が提出した、住民からは移転の合意が必ず無いといけないという第一の条件は、本当に「移転しない（「開発妨害」、「破壊分子」、「インドネシア共産党」、その他の全ての容疑をかけられることがなく）」という選択肢があるということの意味しているのでしょうか。もし、その通りであれば、日本側はゆっくり落ち着いて資金（お金）を管理してさえ下されれば結構です。なぜならば、村に安全に留まることが許されるという選択肢がある場合には、移転を希望する住民はいないからです。

以前述べたように、各世帯主が署名しなければいけないとされている移転宣誓書は、強制的に集められたものです。家から家へ巡り、住民は脅されました。もし住民たちがその時にその書類にサインしないと、補償金を受け取ったり、新しい居住地で家屋や土地を受け取る権利を失ってしまうとされました。

しかしながら、この移転宣誓書は、まだ全てが集められたわけではないようです。バトゥ・ブルスラット村で私たちが出会った住民数名が、何の書類にも未だもってサインしたことが無いと言っていました。彼らがサインしたことがある書類は、彼らの財産目録だけだということです。移転宣誓書は知らないというのです。よって、まだ全部の世帯主が移転宣誓書にサインしたのではないということが暫定的な結論としては言えるでしょう。しかし、住民らのサインが偽造されたり、文盲の住民は騙されたりした可能性もあります。

この移転宣誓書が強制的に集められた後、県で会合があり、そこで住民代表は、水力発電所及び地方政府に対して、彼らの約束事（補償金と移転については、ムジャワラのように住民との協議によって決定する）が本当に守られるように保証する念書を作成するよう訴えました。また、住民は、移転合意の代償として住民が受け取ることができる補償のことを何も知らないまま移転宣誓書にサインをしたのは、本当ならつじつまが合わないことだと主張しています。内容を知らされないまま合意書に署名させられたということで、住民らはすでに被害者になっています。そのため、住民たちは、水力発電所及び地方政府に対し、住民らが合意書を作成したのと同様に、彼らが約束を守ることを保証するように要求しているのです。現在まで、この住民からの要求は無視されています。

3. 補償基準合意

補償金と移転について話し合うために、地方政府及び水力発電所は各村から代表者を呼んで、何度か県（バンキナン）で会議を持ちました。その会議に招待されたのは、普段は、村長（部落長）、慣習法指導者（ニニック・ママック）やその他の代表者です。

補償金と移転の合意達成にむけた会議では、合意に至らず会議は難航しました。コト・

トゥオの住民代表の1人によると、会議の招待状は、いつも期日の直前に来る上、その招待状には会議の議題が何であるかは書いていないとのこと。したがって、招請されたものは、事前に、自分たちの立場を決めるため住民たちと話し合うこともできません。このことは、会議の出席者たちが、いとも簡単に会議の主催者に「操られる」原因になっています。

会議の結果に、住民たちはほとんど満足していません。それどころか、会議に行った代表者たちが、「会議代」として、一人当たり15万ルピアを受け取っているという噂が流れています。その結果、慣習法指導者（ニニック・ママック）のほとんどが、住民たちからの信用を失ってしまっています。コト・トゥオのある住民によれば、県への会議に招待された慣習法指導者や住民代表は、ほとんどが公務員であるため会議の場では勇気をもてずあまり発言しないということです。

住民の代表者に対する不満と、そのような賄賂の（15万ルピアの）噂は、2ヶ月ほど前、バトゥ・ブルスラット村で、住民が村長を追い出す原因になりました。現在では、バトゥ・ブルスラット村の村長は新しい村長と変わっています。ただし、まだ公認はされていません。住民たちはこの新しい村長にも疑念を抱いており、関わりを持とうとしません。

住民の不満が頂点に達したのが、慣習法指導者たちが、補償基準に合意する文書にサインをしたときでした。ある慣習法指導者によれば、強いられたため仕方なく合意書にサインしたということです。金額に合意するための会議はイスラムの断食明けの大祭2日前、伝統と宗教が大変根強い住民たちが大祭に向けての準備や、特に帰省してくる出稼ぎ労働者を迎え入れるのに大変忙しくしているときに行われました。その時も、会議の招待状は突然やってきて、招待状にはその会議でその日の内に補償基準を決定してすることも記載されていなかったため、招請された者は何の準備もせずに会議に行ってしまったのです。

会議は難航し、夜明け前の4時までかかりました。地方政府及び水力発電所側は大変厳しい態度でした。代表者たちは、疲労と恐怖のため、さらには補償基準合意書はすぐに日本に送らなければいけない文書であり、「一時的」に補償基準を定めるに過ぎないものと約束されたため、ついに8ヶ村からの慣習法指導者たちはあきらめました。

それでも、サインしないという、強く自分の立場を主張した人が3人いました。3人とも、コト・トゥオ出身だったのですが、その中の1人は、村長自身でした。コト・トゥオ村は、この水力発電所の問題においては、最も頑強に抵抗していました。村長のダトゥック・マナン氏は、住民の利益を守るために命をかける村長として有名でした。しかしながら、その後、軍や地方政府が何度もこの3人に近寄りアプローチしたため、この3人も後から仕方なく署名してしまいました。

この補償基準合意に署名したことについて住民たちが怒って騒ぎになったため、慣習法指導者の中には村人たちをおそれて、補償金額のリストを見せられないという人もいました。「賄賂を受けた」、「子孫を売り飛ばした売人」などと、代表者に対する非難が厳しく

なりました。合意書にサインするにあたって、20万ルピアずつを受け取ったとも噂されました。

プロウ・ガダン村では、若者のデモが起きました。貼り出されたポスターは、補償金額の合意文書にサインをした慣習法指導者に対する憤った罵りの声などで埋めつくされていました。そして、大勢で県庁を訪れ抗議しました。ただ、ニュースによれば、このデモは県の役人に鎮静されたそうです。

プロウ・ガダン村が一番最初に移転させられる村となりました。この村が一番ダム工事現場に近いからです。今年中にこの村はもう移転しなければいけないようです。

現在私たちはこの村に入ろうと努力していますが、状況は大変困難です。なぜなら、この村の位置は国道沿いで、警察署を含めた行政の役場に近いからです。さらに、上記デモの後、たくさんの軍人や秘密警察たちがうろつくようになりました。できれば、コト・トゥオの協力者を通じて、このプロウ・ガダン村での重要な人物数名に連絡を取りたいと思っています。

全体的に、この水力発電所計画に対する住民の不満が広がっており、政府に対する冷ややかな疑問、または不満となってしまいました。爆発寸前の火山のように、大多数が静かに黙っているとあからさまに述べる勇敢な人たちもいます。

補償金のリストの添付の中に、土地、作物そして建物の補償基準合意書のコピー1枚が添付されています。これは、水力発電所側とコト・トゥオ住民「代表」間のためものです。ティガブラス・コト・カンパル郡の全8ヶ村が、そのような方法でもって合意をしています。(コト・トゥオ村の同意書では、署名しなかった3人の代表の署名欄は空欄です。しかしその後彼らもサインを強いられました)。

この文書こそが OECF の第2の条件を満たすための証拠として日本に送られたものです。その条件とは、補償基準は住民と話し合われ、合意されなければいけない、というものです。

この合意書は、住民の同意なく作成されたことを心に留めておいてくだされば光栄です。

この文書は、次のようなことから、正当なものではありません。

- 1、署名した人たちは、住民を代表していると考えられません。
- 2、署名した人たちは、サインする前に住民たちと協議をしていません。
- 3、署名した人たちは、欺罔と強制の下でこの同意書にサインをさせられました。
- 4、この補償基準には、住民たちが全く合意していません。

住民は、補償基準が変更されない場合、補償金を受け取りたくないと言っています。しかし、ポイントとして、「銀行を介した補償金支払実行」が問題となりうるのです。なぜ

なら、あたかも補償金の支払がすでに終了したかのように偽造することができてしまうからです。そのようにして、水力発電所は、補償金支払のために関連する住民の名義で口座を開設すればいいだけで、結果、補償金の支払の件はきれいに片付いたという印象だけが残ります。頑なに、補償金を取っていないと抗議するのは効果的ではありません。

近いうちに私たちは、住民たちからの反論書を用意するつもりです。そこでは、補償金の同意書も不当なものであるということが明らかにされるでしょう。

4. 移転

政府は、すでに住民の移転地として、コト・ラナ地区、南ムアラ・タクス地区、そして南シベルアン地区（全てがカンパル県に所属）を提案しました。しかし、この地区に関して、住民の間では論争が起こっています。住民のほとんどが、地方政府及び水力発電所側が提示した地区に同意していないのです。

現在までに、地方政府及び水力発電所によって準備が終了している唯一の移転地が、プロウ・ガダン村住民の移転地です。新しい移転地の状況がひどいというニュースはすでに住民の間で広まっています。その新しい村は、移住政策による移住者たちの村々とあまり変わりがないと噂されています。家屋は大変小さく、土で作られただけの床に心が痛みます。モスクも同じようなものです。こうしたことから、住民たちは、後記3、4、5のような条件を提出するに至りました。

移転地については、多くのことで住民たちは嘆いています。農業もしているあるポンカイ村の教師は、土地が肥沃であることを後悔するのです。なぜなら、その土地は手放さなければいけないからです。実際に、現在住民が住んでいる村々の土地は大変肥沃です。肥料をやらずに常に収穫を維持している水田がたくさんあります。また、今の村は、傾斜が緩やかなため耕作が容易です。その教師は、村の肥沃でゆるやかな傾斜の土壌は、新しい居住地となった山地の土壌とは比べものにならないと言います。さらに、住民たちは、特殊な方法を必要とする高傾斜地での農業には慣れていません。

さらに住民を失望させたのは川のことでした。彼らは川沿いで生活を営み、カンパル川を流れる水を得て生活するのが習慣でした。丘になった地域での新居住地では、どこに水源が用意されているのか住民たちは不安に思っています。

おもしろい話がひとつあります。この移転の交渉が行われた際、地方政府及び水力発電所は、住民たちが中核農園方式で移転することに同意するよう努力したと言います。そこではいくつもの約束事が出されました（例えば、「1 ha のパームやし農園では、1ヶ月、中核農園方式だと30万ルピアまで儲けがあります、あなたたちが2 ha ずつ所有しているところを想像してみてください」というような、奇跡的なものがたくさんでした！）

裏に「スポンサーの伝言」があることがよく分かります。中核農園方式で移転させよう

とする地方政府及び水力発電所側の態度は、どうも、農園業者との「陰謀」があるからのようなようです。業者は安い労働力が必要であり、水力発電所は安い移転を望んでいます。したがって、ぴったり（利害が）重なるのです。

幸運にも住民たちは愚かではないので、そのようなパームやし農園の状況がいかに劣悪か知っています。（このダムは誰のためのものか、パームやしの二重のもうけ参照）

5. 野生動物（象）の調査

水力発電所側は、環境で被害を受ける野生動物の問題に関して、常に象に焦点を当てています。水力発電所の野生動物班は、移転させなければいけない現地の象の数は、27頭だといっています。私たちは、その野生動物班が7ヶ月程前にティガブラス・コト・カンパル郡で象のデータ化を行っていた際に、ガイド（道案内や、象の足跡を探す役）となっていた住民に出会う機会もありました。

住民からの情報によれば、彼らの村の周辺にいくつか象の群れがいるということです。その27頭の象というのは1つの群れだけのものです。それとは分かれて棲息している他の群れはたくさんいます。地域は大変広範囲に及ぶに関わらず、水力発電所の野生動物班は、ほんの短期間（10日間）しか現場にいなかったため、1つの群れしか確認できず、たったそれだけの頭数しかいないという評価をしてしまったものです。

私たちが出会った足跡探索人、ゴム樹液採取人、また畑地で働く人みんなが、実際はその数よりも象ははるかに多いと確信しています。一番少ない予想でも、おおよそ60頭から3ケタの象がいるとされています。

住民によると、以前は象の住処になっていた「リンゴ・ガダン（大きな森）」は、現在ではパームやし農園と HPH（森林伐採権；私企業の森林伐採のために政府が付与する権利）のために伐採されつくしており、象が移動するスペースは限られています。パームやし農園がたくさん造園されて以来ここ数年、まさに生息地が狭くなってきているため、象様はしばしば住民の畑地を襲撃されます。このことこそ、住民がパームやし農園を問題だと思っている理由です（パームやし農園参照）。水力発電所によって、現在の地域が沈められてしまうと、象が移動できる範囲はますます狭くなり、象さんはますます凶暴になって住民の畑地や村を襲うようになってしまうことが懸念されます（アイル・スギハン事件を思い出してください）。

一方で、象のほかにも、その存在を水力発電所に報告されたことが一度もない（もしくは報告する勇気が無い？）野生動物はたくさんいます。それはトラです。さほど遠くに行かなくても、村のそばの道沿いですら、「トラの地域」として知られている地域がいくつかあります。

また、マレーグマも、水力発電所によって秘密にされている動物の1つです。住民によ

れば、多数生息しています。凶暴で、集落に進入し、ヤシ、ランブータンのような果物を取りに回るのです。実際このクマのほとんどは森の中で暮らしています。

他の動物は、「チパン」の名で親しまれているこの地方のバクです。この動物は、住民によれば、森の中で暮らしていてもついに集落に入ってきません。忘れてはいけないのは、このバクは、絶滅危惧種でなおかつスマトラ地域独特の種類であると分類されているのです。

まだ物足りないのであれば、現地周辺の森には、シアマン、ギボン、リーフモンキーのような霊長類も生活しています。さらに、地方固有種のスマトラ森ヤギもいます。

上記に述べた動物の全てが、保護しなければいけない動物リストに上がっている種なのですが、(わざとなのか?) 水力発電所の環境班によって、一度も報告されたことが無いのです! (世界中の怒りを買うのが怖くないのでしょうか?)

これらに基づいて、何が失われたか、という話にもし私たちの中でなれば、何千年の進化の成果を誇る生物種の多様性あふれる熱帯林のエコシステムが消えてしまったという話になるでしょう。この喪失は、何によってでも取って代えることはできないのです。

リアウの自然は、すでに盗り尽くされ無くなっています。何百ヘクタールの森林はすでに農園地帯や森林伐採権(さらには合板工場、製紙工場)へと風変わりしました。残ったほんの少しも、沈められてしまうというのです!

住民が要求する条件

もし選択が許されるなら、住民は当然「移転しない」ということを選びます。先祖代々受け継いできた土地を離れることは、彼らにとっては大変辛いことだからです。

しかし、今となっては、村に残ることは、(そう提案することはおろか) そうした考えを抱くことすら、すでに反逆罪的な行為になっているので、住民は後の生活が悲惨なものにならないよう、せいぜい彼らの「交渉力(バーゲニング・ポジション)」を高めることしか出来ないのです(でも先祖代々の土地を離れることがすでにもう災難なのですが)。住民が掲げている条件は次のようなものです。

1. 補償金

絶対条件として、補償は協議の上、住民によって承諾されなければいけません。政府が今押し付けている補償金は話になりません。以下の例を見てみましょう(住民の生計の中心になっているものは3つあり、ゴム、やし、コーヒーです。したがって補償金のことを言うときは、この3つの作物を考慮しなければいけません)。

【ゴム】

(住民の生計の要をなす) ゴムの木1本あたり、政府は2000ルピアと決めています。しかし、住民の所有するゴム園1ヘクタール辺りの収穫は、1日で10kg程度にもなります。売買される市場価格は1kgあたり600~700ルピアなので、1ヘクタールのゴム園(およそ500本のゴムの木がある)の1年間の生産は、200万ルピア以上になります。それを政府はたった100万ルピアで買収しようというのです。

【やし】

政府の決めたやしの金額は、中でももっともひどいものです。すでに収穫可能なやしは1本4000ルピア、まだ収穫できないものは1500ルピアとされています。

1本のやしの木には約30個の実がなり、それぞれ熟していきます。一般的に、毎月1~2本の枝に6~10個の実がなっていて、それを取るのです。枝は取ってもまた次に生えてきます。だからやしというのは1年中絶え間なく生産が可能なわけです。しかも、やしの木には何の資本も要らず、手間もかかりません。やし1個の値段は、バトゥ・ブルスラット村の市場で400ルピアします。したがって政府が提示した金額というのはいかに安いのか、ということが分かります。それは1枝分でしかありません。

【コーヒー】

収穫可能な木1本1600ルピア。まだ収穫可能でない木、500ルピア(もはやコメントすらできません)。

【ドリアン】

収穫可能な木1本8250ルピア。まだ収穫可能でない木、2000ルピア。しかしドリアンは1年に1回の収穫期において、1本の木に300個以上の実が採れます。新しい村でまた植えればいいというかもしれませんが、植えてから収穫できるようになるまでに20年はかかるのです!

【屋敷地】

タンジュン・アライ村、バトゥ・ブルスラット村、ポンカイ村、コト・トゥオ村、ムアラ・タクス村、グヌン・ブンス村はすべて、「カテゴリー4&5」という区分に含まれます。その居住地の土地価格は、1㎡あたりたったの450~550ルピアとされています。

【水田】

この地方に水田はあまりなく、その多くは灌漑もありません。1㎡あたり400ルピアとされています!

【畑地】

この土地こそが住民の生活の中で心臓にあたるものです。ここに住民はゴムやコーヒー、丁字、陸稻、キャッサバ、果物やそのほかの作物を植えています。このほとんど肥料も要

らない肥沃な土地が、1㎡あたりたったの30～40ルピアと定められています！！

【養殖池】

この値段は他の土地よりはるかに高額です。というのも、この地方にはあまり養殖池がないことからでしょう。カンパル川は魚が豊富なため、養殖池など必要が無いのです。もし養殖を生業とする地域であったなら、政府はもっと違った対応をしていたでしょう。

【建物】

恒久的建築物というものの基準は何でしょうか。セメントの建物とは何でしょうか。住民たちの家屋の大半は柱の上に立っている木造住宅です。その中には古い家屋も多く、木材に彫刻を施してあります。その木材の値段は今ではその価値を計れないほどなのですが、このような建築物は1㎡あたり2万5000ルピアとされています。

石造りの住宅もまた問題です。この川沿いの村々では、川から簡単に砂や砂利を取ることが出来るので、石造りの家屋を建てるのはかなり安上がりになります。しかしながら、移転地ではそれらが簡単ではなくなるため、石の家を建てるということは夢となるでしょう。石造りの半恒久的建築物の補償金額が、1㎡あたり4万2000～4万6000ルピアとされているのを見ると、なおさらでしょう（完全な恒久的建築物はここにはほとんどありません。なぜなら、「完全な」というと、建物の中にトイレがあるという基準だからです。実際にはトイレは母屋から離れたところにあるのが普通になっています）。

2. ウラヤット地（慣習的共有地）

水没してしまう氏族のウラヤット地は、同面積の土地によって補償されなければいけません。ここで興味深い話があるのですが、水力発電所側は、リアウ社会文化研究所所長のタブラニ・ラブ博士の言葉を用いて、「コトパンジャン水力発電所建設は、クドゥン・オンボの場合とは違い、特に社会問題に関しては違う。それは、コトパンジャンにおいては住民と土地の結びつきがそれほど強くないため、クドゥン・オンボのような社会的軋轢は起こらないだろう」などと言っています。このことは、1990年1月第2週の「ムティアラ」（現地週刊誌）に掲載されています。このような話は、私たちが現地ですら実際に目の当たりにしたことからして、本当にばかげているとしかいいようがありません。

ティガブラス・コト・カンパル郡は大変根強い慣習をもつ住民社会です。彼らの慣習、伝統は、言語、政治社会構造も含めて、ミナンカバウ社会のものです。

この地方のそれぞれの村には、慣習法指導者（Ninik Mamak）、イスラム学者（Alim Ulama）、学識経験者（Cerdik Pandai）の3人の指導者がおり、「3長老」を形成しています。このパターンはミナンカバウ社会の特徴的な社会構造です。ニニック・ママックは慣習法指導者としてたいへん大きな影響力を持ち、人々からも尊敬されています。彼らはそ

れぞれひとつの氏族に由来する1群の家族を率いていて、その氏族の長を氏長 (penghulu) といいます。1つの村にはたいてい3つの氏族がいます。ここの氏族は、西スマトラのチャニアゴ (Caniago) 族やピリアン (Piliang) 族などと同じようなものです。

こうした氏族は大変古い社会的集団で、数百年も昔からその地に住んでいるので、ミナンカバウと同じように彼らもウラヤット地をもっています。

問題なのは、水力発電所側は、上に述べたタブラニ・ラブ博士同様、(意図的に) 彼らの慣習法が存在することを認めようとし、ということ。とりわけウラヤット地に対する彼らの権利を認めたくないのですが、その理由として、発電所及び地方政府は(社会学者という専門家に助けられて)、ウラヤット地 (タナ・プサコ / tanah pusako ; 先祖代々の地と普通は呼ばれています) は西スマトラのミナンカバウにしかないものだ、と主張しています。

このことにニニック・ママックはたいへん怒りを覚えています。「私たちがリアウ諸島の人たちと一緒にしないで欲しい。あそこにはウラヤット地は確かに無い。私たちは、地理的にはリアウ州の一部だけれど、文化的にはミナンカバウなんだ。」

したがって彼らの要求のひとつとして、水没するウラヤット地はそれと同じ広さの土地で補償されるべきだ、という話になるのです。「ウラヤット地については金の補償を求める気はない。なぜなら、ウラヤット地というのは、売買できるようなものではないんだ。しかも森になっているような土地をどうやって金に換算するのかね。土地は土地で補償してもらいたいんだ。」とまた別のニニック・ママックはこうも言いました。「私たちの村の周囲が森になっているのは確かだ。しかし、その土地をジャワのように地主の居ない土地というように見なしてはいけない。それはここにいる氏族たちのウラヤット地なんだ。だからダム周辺にあつて水没しないウラヤット地は彼らに所有権があるということを要求しているんだ。」

このような住民の話から分かるように、水没する村の住民にとって土地は単なる居住地ではなく、「(受け継がれてきた) 血の流れる地」であり、彼らの歴史がそこに根を張り、先祖が埋葬されている土地なのです。

3. ゴム園 2 ha

次に住民が要求しているのは、1世帯あたりすぐに収穫可能な2 haのゴム園を供与されることです。しかもこのゴム園は中核農園方式(換金作物の生産を目的とした農園を造成し、移住者をそこで労働者として働かせる方式)であってはいけません。

住民は、このプロジェクトが相当以前から(F/S やアセスメントは1984年に出来ていた) 準備されているのなら、どうしてもっと早くから対応してくれなかったのか不思議に思っています。今のようになって急に補償するとなった場合、どういった補償がなされ

ようと結局住民は損をすることになります。

彼らのゴム園は十分な生産量がありますが、そうなるには（木を植えてから）6年はかかります。今新しい場所に移転したら、補償金（これさえも小額）はゴム園、畑地、家屋などを準備するのになくなってしまいます。たとえゴム、やし、コーヒーなどを植えたとしても、収穫を得るまでには相当の年月がかかります。その間、生活費をどうやってまかなえばいいのでしょうか。また、子供の学費はどうなるのでしょうか。

移住政策に基づく移住者のような1～2年の生活保障（米、油、塩漬け魚など）には、あまり彼らは乗り気がしません。経験によると、そうした移住者用の生活保障はいとも簡単に汚職の対象となって、供給されるものは最低の質ものだそうです（住民は、家畜のえさだといっています）。だから、その収穫可能なゴム園2 haの要求は、彼らにとって最もなことなのです。

4. 移住政策に基づく移住者のように扱って欲しくない

住民は、先祖代々、発電所建設地および周辺の土地の所有者なので、彼らの移転の方法、移転地の様式などが移住政策に基づく移住者のように行われるのは好ましくありません。先祖代々の地において移住者と成り果てるのは受け入れられないことなのです。このような点において、ジャワからの移住者などとは地位が違っていると彼らは思っています。

したがって、彼らの新しい居住地が、移住政策に基づく移住地のようにならないよう要求しています（例えば家屋が移住政策に基づく移住者用のものにならないように）。新しい村は、古い慣習、古い構造を変えないように造成されなければいけません。彼らの移転は、高地に村ごとと少しずらすといった程度のものでないといけません。

5. 新しい移転先の地域の決定に住民も参加できなければならない

まず、住民は水没しないウラヤット地への移転を希望しています。そうすれば、彼らの歴史的なものは消えることが無いからです。こうしたウラヤット地は、後にはダム湖周辺の土地となります。したがって、当然のことながら、湖の周辺の土地利用に関しては、彼らに優先権が与えられるべきでしょう（すでに湖周辺の土地はかなり投資家が注文していることに鑑みて、適格な予想でしょう）。そのほかに、移転地の村は車が走れる道路沿いにあることも求めています。

6. 公共施設（特にモスク）は同じものを建てること

ティガブラス・コト・カンパル郡はたいへん宗教的に熱心な住民社会です。さらにそこには大きくて有名なイスラム寄宿学校があります。その影響は、日常生活においても十分

に感じ取れます。住民の社会活動は、その多くが、コーラン読み、講演会、祈祷、会合など含めてモスクを中心としたものです。つまりモスクは非常に重要な社会的役割を果たしているのです。ということから、プロウ・ガダン村の住民の移転先に用意されたモスクを見たとき、住民が衝撃を受けたのも無理はありません。それは7 m×8 mの小さなものだったのです。一方で、彼らのもともとのモスクは大きくて立派なものでした（少なくとも15 m×15 mはあって、彫刻も施された美しいもの）。しかもそのようなモスクは住民のお布施で、住民自身の手で建てられたものでした。

そのようなモスクを建てた発電所側の言い分は、すでに村のモスクについては、補償金を支払ってそれは村の金庫に入ったのだから、こちらのモスクはプロジェクトによる「贈り物」であり、住民にしてみれば、ただであたえられたものである、というのです。しかし住民が信じているイスラム法によると、宗教的な土地も売買することは出来ないであり、お布施によってできた建造物も同様でしょう。

したがって、住民は彼らのモスクがお金によって補償されることを望んではいません。少なくとも以前と同じ大きさ、質のモスクを建ててもらわないといけません。以前のより大きければ言うことはありません。また、他の公共施設・建造物についても同様の要求をしています。

7. 発電所側による移転費用の負担

このプロジェクトは住民が望んだものではないので、住民は、移転費用を発電所側が負担することを求めています。「そうしなければ、補償金は引越して使い果たしてしまう」とある住民は語っています。もし費用を負担してもらえれば、住民はできる限りのものを移転先に持ち運ぶことができます。

このダムはいったい誰のためのものなのか

リアウ州地方開発局局長のリファイ・ラフマン氏は、コトパンジャン・ダム建設は、農園業分野での開発を支えるのが目的である、と述べています。「鉱業に依存しているリアウ州は、結局そのままでは住民の収入を増やすことがあまりできなかった。そのためリアウ州政府として、農園業分野に力をいれてみることにした。すでにパームやしやハイブリッドやしの農園を数万ヘクタール開墾している」と言っています。「農園業にとっては、電力が大変重要になってくるため、そのコストを削減するための唯一の望みが、コトパンジャン・ダムなのだ。というのも、この間投資家たちは、それぞれ各自の発電機を使っているからで、そのため、彼らはこのような分野に投資をしようとしてこなかったのだ。」これはパダンの新聞記者に対して、リファイ氏が語った言葉です。（「ムティアラ」19

90年1月第2週号)

カンパル県知事、サレ・ジャシット氏は、コトパンジャン・ダムは現地において工業化を促進させるだろう、と言っています。工業というものは、たくさんの電力を必要とします。パームやし、ハイブリッドやし、ゴム、カカオなどの農園業の発展で、やがてそれらを加工する工場が必要になり、そういった工場を稼働させるのにたくさんの電力が必要になります。「想像してみてください。10万ヘクタールのパームやしの農園があれば、少なくとも1時間あたり6万トンのパームやしを処理できる大規模工場が10～15個は必要になる。その電力はいったいどこからまかなうか。コトパンジャン・ダムは大きく貢献することは当然である。」(「パンジ・マシヤラカット」1991年1月21～31日号) けれどころか、リアウ州知事(知事様は現地出身ではなく、ジャワ人)によると、コトパンジャン水力発電所の発電量は114MWで、それがパームオイル工場や合板工場など、加工業の推進に果たす役割が大変大きい、とのこと。(「ブリタ・ブアナ」1991年4月9日付)

プカンバルの農園に勤めるある人によれば、10年ほど前に植えられた数十万ヘクタールのパームやし、もう実をつけだした、とのこと。その加工工場も早急に必要とされているそうです。今までは、このやしの実は、加工のためメダンに輸送されていました。こうしたことから、この水力発電所プロジェクトから利益を得るのは誰か、すでにもう明らかでしょう。

パームやしの農園や、その他の農園、そして製紙工場や合板工場など、加工業ができた頃から、すでに(安い)電力を供給する施設を建設する計画が(政府に)あったのではないのでしょうか。そうでないとすれば、このような一連の出来事は偶然と言えるのでしょうか。政府の言い分は、こうした産業はリアウ住民の生活を向上するためのものだ、ということです。はたしてそれは本当でしょうか。

リアウはもともと豊かな地です。インドネシアでも有数の産出量を誇る石油をはじめ、巨大な合板工場や製紙工場、また1日当たり数万トンもの木材を供給する熱帯林、スマトラで(世界でも)最高のマングローブ林など。農園はもともと数百万ヘクタールにも及びます。これらから、リアウはインドネシアにとっての最大級のドル箱地方となっているのです。

しかしリアウを旅行し、その街に入ってみると、不思議でならないことがあります。その桁外れな豊かな資源は、いったいどこへ行ってしまったのでしょうか、と。その面影すら見当たりません。リアウの表情は貧しくて、美しくないのです。行きかう人々の顔や、村、街には、彼らこそが豊かな国の持ち主、最高級の木材を生産する森、数百万バレルもの石油を秘める大地、数十万ヘクタールものパームやし、植えられた土地の住民、という面影はありません。

リアウ州の地方開発局局长、リファイ・ラフマン氏自身、「鉱業に依存しているリアウ

州は、結局それでは住民の収入を増やすことができなかった。だから政府としては、農園業分野のほうに力をいれてみることにした」と口にはしているのです。

さて、鉱業（特に石油）を「民衆の生活を向上させる産業」のリストからはずしてもいいでしょうか。実際には、この鉱業の収益だけでも、もしリアウの住民自身のために使われていたら、ここはブルネイのように豊かになっていたでしょう。

農園はどうでしょうか。コトパンジャン水力発電所建設のための理由のひとつになっているパームやし農園はユニークな例かもしれません。

住民たちは、こうしたパームやし農園は、ジャワからの労働者たちの場所だと言っています。彼らの中には、すでに農業では生活をやっていけなくなったジャワからの移住者たちが、リアウで盗みをはたらいてしまう、と話す人たちもいました。飢え死にするより泥棒の方がマシなのでしょう。「食べるものが無くなったら、他にどうしようもないじゃないか」と住民は口にはしています。

ここで、あるパームやし農園の例を挙げましょう。それは2万5000ヘクタール（シンカラック湖のおよそ25倍）もの住民の土地を開墾して造園されました。それ以前は象や虎、バク、熊などが多くいたリンボ・ガダン（ミナンカバウ語で「大きな森」の意）でした。森を開墾したとき、たくさんの古い木が切り倒されました。「私たちはそのような丸太の側で立って」、「そして腕を上挙げて、この手よりもっとこの木は大きくなったんだよ」、とも言う住民もいます。「何千年の木なのに」と住民は惜しがりました。「ムランティ火山がどのように成長していったか見ていただろうね」。ムランティ、クルイン、ブリアン（すべて木々の名前）、この木々はどれほどすばらしいものだったでしょう。

住民によると、土地の開墾は、直接木材買い付け業者によって行われました。森林伐採権（HPH）がおりたのでしょうか。それどころか、彼らは伐採し尽くすことができるためより利益が大きいわけです。そのようなパームやし農園の設立費用は、土地開墾の際の木材を売却した利益でまかなわれました。「森は本当の処女林だった」と住民は言っています。

その農園ができてから、以前は森に住んでいた象が、現在では住民の畑地を荒らすようになりました。やし農園には電気を通した鉄線が張られ、象は入れない、だから仕方なく彼らの畑地がターゲットになるのです。住民たちはどうしたらいいのでしょうか。

住民はみんなこう口にします。「もし、象の被害が無ければ、ここに住んでいる住民はずっと金持ちになることができた。多くの生産可能なゴムの苗木を植えることができる」と。ゴムを植えた後4～5年は、象に苗木をやられ尽くさないように待たなければいけないのです。また、若いゴムの木だけではなくて、陸稲すらしばしば被害に遭っているのです。

以前農園がまだ無かったころは、里まで降りてきた象は楽器などを使って簡単に追い払うことができました。しかしいまや象はどう猛になって、人間を怖がりません。それどこ

ろか、追い払おうとする人間に襲い掛かる象もいます。確かに、象にさえも他の選択肢は無いのです。以前住んでいたところは消えてしまい、もし人里まで降りなければそれは餓死を意味するのですから。

おかしいことは、この農園は以前は「第6農園株式会社」（※訳注：国営のプランテーション株式会社）であったのにもかかわらず、生産が始まるとどうしたことか、噂によると、政府の役人に所有された会社になったということです。

これこそが、「リアウの人々の福利厚生」と望まれる農園の1つのプロフィールなのです。さらに、その農園のためには、2万人の人たちが故郷から追いやられなければいけないのです。

この下には、リアウ州における「開発の機関車」の奇跡をペーパーにしてみました。

開発の神々の顔を暴く

パームやしのダブルの利益

上記のような問題を見ると、パームやし農園業者たちが、さまざまな利益を得るために権力者たちとの関係を武器とするやり方が明らかです。

リアウと水力発電所の問題においては、シナリオは以下のようなものです。

まず、政治権力を持っている人（農園業者自身が権力者である可能性も大いにあります）との関係を通じて、農園の割譲を試みます。このように割譲された土地は、もちろん住民の土地をたくさん丸呑みし、野生生物の何千もの生息地（保護されているものを含む）を破壊します。

農地を開く過程で伐採される木々の価値はたいへん高いものです。それどころか、森林伐採権（HPH）の割譲にくらべても多大な利益を得ることができます。なぜならば、森林伐採権の場合は、「選択的伐採」をしなければいけません、土地開墾の場合は当然ながら合法的に皆伐することができるからです。

木々の売却から得られる金額は農園を造成するために必要とされていた最初の資金全部をカバーするかもしれないほどです。それどころか、おそらく過剰なほどでしょう。

安い労働力が、ジャワからの移住政策に基づく移住者としてやってきます。移転やその他もろもろの費用は農園（業者）からは支出されません。移住政策のプログラムを通じて、国（住民たちが払わなければいけない負債でしょう）が負担するのです。

通常は、最初の段階では、まず割譲された土地の一部だけが植林されます。植林はその後も続けられます。植林が進むと当然のことながら労働者を増やすことが必要になります。しかし、労働者を採ることは大変難しい状況にあります。それは、パームやし農園で働きたいという人はたいへん少ないからです。

そして、また別の大きな問題があります。それは、電力です。

そのような巨大工場を建設するには、ディーゼル発電機は大変高価につきます。だからこそ、業者は、できる限り安い生産賃金を探すのに努力するのです。

さらに、2つめの答えとして、水力発電所プロジェクトがあります。安い電力、安い労働力なのです。

この水力発電所プロジェクトを企画するために、政府と農園業者との間で「以前に収益を計算していた」と私たちが想像するようになったとしても、おかしいことではありません。さらに、私たちは、その農園の株式を所有している者が誰であるか、聞かなくても知っています。

インダー・キアット製紙工場

この巨大な製紙会社は、毎日1万2000トンの紙の半製品を生産しています。それによって上質の木材を数千トン消費しています。こうした木材は、華人経営の巨大な森林伐採企業によって供給されています。

工場は5メートルの高さのコンクリート塀によって囲まれていて、外部の人間は特別の許可が無ければ中に入れません。10キロメートルはなれたところすでに、パルプ加工による汚染からの、吐き気をもよおすような悪臭が漂っています。なれていない労働者は、工場の敷地に入るとき、吐いたりしてしまうそうです。

この巨大製紙工場は、大半がジャワからの労働者、そして少数のタパヌリ出身の労働者たちを、悲惨な状況の中で働かせています。労働者の健康問題はほとんど考慮されていません。労働者、経営者、住民との間に頻繁におこる紛争を解決するに当たっては、よく軍が出動しています。

水力発電所の「好ましい影響」に対する反論

水力発電所についての出版物で（前の〔※訳注：1991年〕5月半ば、プカンバルで行われたNGOのセミナーで発電所側が用意したものなど）、政府はいつもこのコトパンジャン水力発電所は好ましくない影響を全くもたらさないと述べています。そして、その素力発電所の好ましい影響をプロパガンダすることに力を注いでいます。

そこで、政府の言う好ましい影響をあげ、それに対する反論をひとつひとつ、以下の通り述べます。

1) 好ましい影響：

一水力発電所が発電する114 MWの電力は、リアウ州内陸部において、経済と開発の成長を促すために大きく貢献するでしょう。それは次のような分野においてです。

- a. パームやし工場、合板工場、ゴム工場などのカンパル・カナン川下流での産業発展。
- b. 家庭的産業、小産業発展。
- c. 観光業

議論：

- a. 本当は、パームやしなどの産業発展こそがこの水力発電所プロジェクトの、表には明かされない理由なのです。しかしながら、すでに述べたように、この産業からリアウ住民の福利厚生利益になることがあるという話は、疑ってかかる必要があります。
- b. 家庭的産業、小産業を発展させることはそんなに簡単なものではありません。必要とされているのは、特に資本、スキルと市場です。電力だけでいいものではありません。さらにもし小産業のためというのなら 114 MW まで電力は必要ありません。

2) 好ましい影響：

—コトパンジャン水力発電所は、リアウ住民の家庭を明るくするために建設されます。

議論：

この理由は、あまり政府に表沙汰にされません。恐らく、ウソであるという度合いがあまりにも大きすぎるからでしょう。セミナーのために水力発電所が用意したペーパー上でさえ、(勇気が無いのでしょうか?) このプロジェクトの目的は、住民の家庭での電力消費のためであるということはありません。

もし本当に住民の家庭に電気を供給するためなら、リアウ地中からすでに何百万バレルもの石油を搾取した Caltex のような巨大石油企業が、住民がたった 300 万人しかいない州のために電力を用意することで、リアウ州住民にそれ相応に償って、さらには「大きく貢献して」いることでしょう。

それでもまだ不十分であれば、不足分は規模の小さい発電所で補うことができます。

3) 好ましい影響：

—新しい国道建設を通じての新しい地域の発展。さらに、よりよい新道の状態で、安全面、快適面の要素が向上し、さらに移動時間も短縮されます。

議論：

もしこれが理由とされるのであれば、水力発電所プロジェクトが無くてでも、お金さえあれば新道は建設できます。水力発電所ある無し関わらず、道路建設は常にお金が必要です。この水力発電所プロジェクトでは、道路建設のためのお金は借款からであり、空から降ってきたものでも何でもありません。言ってみれば、自分自身で道路

を建設するのと同じことなのです。

それどころか、この水力発電所を通して道路を建設することは、実際は損なのです。それは、水力発電所は、昔の道路を沈めてしまうからです。もし私たちがこのプロジェクト無しに自分たちで道路を建設すると、2本の道路が存在することになるからです。それは、各道路の負担を減らし、地域の流通を拡大し、住民経済活動の成長の機会を広めることになります。(なぜなら、道路が多くなればなるほど、経済活動のチャンスはますます大きくなるからです)

4) 好ましい影響:

一雇用機会がひらけ、ダム周辺地域で新しい企業の分野がひらけます。

議論:

政府はどうも、あそこの住民たちはみんながみんな失業者だと仮定しているようです。しかし、住民はすでに農園、畑地、水田などを所有し仕事を持っています。仕事がないどころか、住民たちはゴムの樹液を採取するのに人手が足りないくらいです。

この水力発電所プロジェクトは、何千もの住民の収入源をだめにしてしまいます。たった一時的なプロジェクトでの雇用機会など何の意味があるのでしょうか？(さらに、現地住民が持っている適性など、せいぜい肉体労働者として働くことができるくらいのものでしかありません)。水力発電所プロジェクトと雇用機会は、「土地所有者」から労働者へと住民のステータスを変えるものでしかないのです!

5) 好ましい影響:

一新居住地の建設と移転は、つまり、以前はバラバラであった住民を一つの場所に集めることによって、住民は、電力、水道水、中学校など、政府からの公共設備をより多く割り当てられることが容易となります。

議論:

住民はバラバラではありません! 彼らの村々は、カンパル川とマハット川沿いに、システムティックで、整然と作られています。さらに、そのような彼らの集落のシステムはすでに何百年も続いています。もし公共設備を供与したいのであれば、現在の彼らの村に供与すれば十分です。その方が、道路は既に存在し、新道を建設する必要もなく、せいぜい昔の道路を修繕する程度ですむ上、はるかに安上がりです。

上水道? カンパル川とマハット川、そして住民たちの井戸では、つねに水が絶えません。この村々では、水源は本当にたくさんあり、住民にとって、溢れ出す水が普通のことになっています。電力? 中学校? もし本当に設営するつもりなら、どうして新しい土地でなければいけないのでしょうか? 実際は、ここの住民たちは、どこからも援助を得ないで、住民たちのお布施で建てられた豪華なモスクで分かるよう

に、十分自給自足できる、またそのパワーを持っているのです。

1000人の生徒を抱える中等部、高等部まである大きなプサントレン（イスラム寄宿学校）も、国公立の学校ではありません。

公共施設の設置は、今までの村でも行うことができます。にもかかわらず、その設置をしやすいようにするというだけのために、とても安上がりとは言えない方法で、長い歴史の中で十分に整備され安定した集落を壊し、別の新しい村を建設するというのは、全く納得がいかないことです。

6) 好ましい影響：

—新居住地で企画されているプログラム（農業、農園業、畜産業、漁業その他）は、元の村に比べれば、住民の年平均収入を向上させるでしょう。

議論：

もし本当に、目的が住民の収入を向上させるためであれば、現在の村でそのようなプログラムを作成すればよいはずです。新しい村でも昔の村でも、プログラムの費用は同じものであるはずです。それどころか、昔の村では、もう農園があり、新地を開墾する必要がないため、費用はもっと安くて済みます。水田も同じようなもので、品質を改善すればいいだけで、住民がよく知っている地域を管理するので、当然全く知らない地域を管理するよりもっと容易です。

7) 好ましい影響：

—洪水をコントロールします。

議論：

もし洪水をコントロールするだけであれば、何万もの人々の故郷を沈めてしまう、124平方kmもの広さの（巨大なダム湖を造る）水力発電所プロジェクトではなくて、洪水制御ダムを建設すれば良いだけでしょう。そして、忘れないでいただきたいのは、洪水というのは、上流域の森林が、森林伐採権で丸坊主にされて巨大なパームやし農園にされて以来、猛威を振るい始めたということです。当然ながら、責任を取らなければいけないのはその農園業者たちであって、現地住民ではありません。

ムアラタクス寺院の水没

ムアラタクス（複合）寺院は、スマトラにある最古の遺跡とされています。寺院群の広さは約1ヘクタールほどで、4つの寺院から成り立っています。現在ではそれぞれに名前がつけられています。トゥア寺院、マフリガイ寺院、パランカ寺院、そしてブンス寺院です。

この遺跡は、インドネシア独立のずっと以前に（当然オランダによって）、発見されたもので、この歴史の遺産に関して、研究者でも未だに詳しいことは分かっていません。遺跡群を見てみると、非常に美しく堂々たる建設物なので、かつてシュリーヴィジャヤ王国の中心があったところではないかと唱える人もいます。

実際にそうだとすると、このムアラ・タクス寺院に関して、現在まで何が解明されたでしょうか。仮に研究者（知識学問のため）や住民（たまたま見つけて後は売ってしまう）によって発見された古代の器などに比べれば、まだ何の意味もないものばかりです。

カンパル川端にあるという寺院の位置を見てみると、この王国の住民の移動性は、大いに川に依存していたことは確かでしょう。バトゥ・ブルスラット（寺院群から下流13キロメートル）で古代の遺品が発見されたことで、そのことに対する確信がより強くなりました。

ムアラ・タクス寺院史跡を守るために、当初海拔100メートルまで水没させる予定だったのが85メートルまで下げられました。これによって海拔87.5メートルにある寺院群（半径4ヘクタール以内）は安全となりました。

考察

たとえインドネシア政府が言った通り、4ヘクタールの広さ分が沈まなかったとしても、水力発電所計画は災害であると感じられるのです。なぜなら、4ヘクタールの島で、124平方kmのダム湖の中心に浮いている島、それ以上の意味がなくなってしまいます。

当然知っておくべきことは、ある史跡に対する意味を理解するために必要なことは、その発見された周辺での調査、発掘に他ならないのです。

文化的中心の再建、もしくは恐らくそうであつただろう王国の中心（ムアラ・タクス史跡に関する人々の仮説のように）の再建は、その寺院が建っていたそこだけを調査するだけではできません。言い換えれば、ムアラ・タクス寺院の歴史を解き明かすには、その寺院を守るだけでは不十分です。その周辺、特に川沿いの地域も保全されなければならない、そこにこそ解明のための鍵が発見できる可能性があるのです。文化の心臓、王国の中心は1、2ヘクタールだけの小さなエリアではないことは明らかです。

仮にその複合寺院が王国の中心のしるしとして解釈されるとしたら、移動性（交通）は川に依存しています。その川がもしダム湖の底に沈まず、現状のまま残るのではないとすれば、どうしてその王国の研究ができるでしょうか？

問題解決の要求

政府は繰り返し、当初より予算が350億ルピアとされているので、補償金の追加はあ

りえないと明言してきました。しかし、これくらいの予算では、確立したコミュニティーである2万人の住民の生活を、人道的に補償する事ができるはずはありません。

私たちの答えは当然、もしお金が無いなら、プロジェクトを進める必要はないということです。

今おきていることは、ちょうど市場へ買い物に行つて、3000ルピアで1万ルピアの物を買ってくれとせがんでいるようなものでしょう。もし売ってくれないのなら、刀を出して脅迫するのです。これでは強盗です！（まったくもつてその通りです）それどころか、コトパンジャンの場合では、商品を買おうという気さえもともと無いのです。

もし、どうしても買いたいとせがむのであれば、足りないお金は当然足さなければいけません。「どこから来たの？」 政府さん、いや、そこの買い手さんに尋ねてご覧なさい。「私のお金はこれだけなの！」 当然お金を足さなければいけない人は誰でしょうか？ もちろん、その品物を必要として使おうとしている人です！。

したがって私たちの要求はたいへん明確です：プロジェクトを取り止めなさい！

もしそれが不可能なら、住民の求める条件を全て満たすようにしなさい。もしお金が十分無いのなら、いくつかの提案事項があります。

—補償金問題を片付けるために、日本の海外経済協力基金（OECD）から資金を追加してもらうこと。（これは実際には最後の選択肢です。なぜなら、これで私たちの国の対外債務がかさむ事になるからです。）

—このダム建設によって最も利益を得る側（農園や加工工場の経営者たち）に、足りない分の補償金を出させること。

おそらく2番目の選択肢の方が合理的に思われます。私たちは公平に考えなければなりません。ある業者で、それで利益を得て喜ぶ人が、それから被害を受ける人たちに対して貢献するとはどういうことでしょうか？

このコトパンジャン水力発電所の電力でもっとも利益を受ける業者たちは、住んでいるところを追いやられる人たちに対して貢献しなければいけません。

その工場がどれほどまで巨大かということを考えれば、またコトパンジャンの電力生産で彼らがどれほど利益を得るかを考えれば、そのような要求は当たり前のもので、当然に満たされなければなりません。

さらに、もしリアウの自然を搾取したため彼らのポケットに流れてしまったのは、何兆ルピアだろうということを考えれば当然です。

私たちは新聞で、巨大企業がテニスの試合やモーターレースなどのために何億ルピアもの資金を出しているという記事をよく読みます。それどころか、マラソンの試合で新記録を出した選手には、1億ルピアの賞金を用意されているのです。

自然が限りない富を与えてくれる、ある国では、巨大企業は住民たちのために進んで資金を提供するのが当たり前になっています。ところが、その一方で住民たちは巨大企業の

ビジネスのために住んでいるところを追いやられなければならないのです。